

# OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**233,30**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**79,4**

APBN 2025  
(miliar Rp)

**329,96**

Outlook 2025  
(miliar Rp)

**2.692,0**

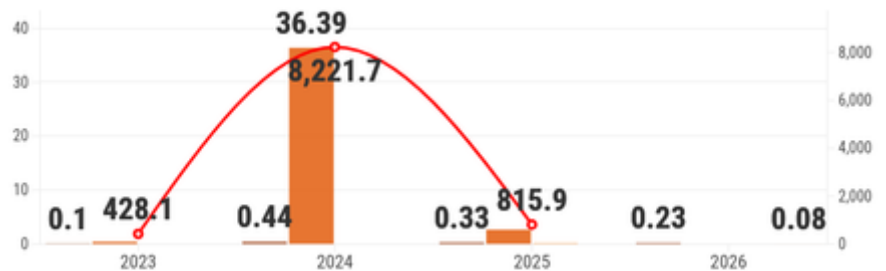
LKPP 2024  
(miliar Rp)

**36.391,7**

## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ % Realisasi ■ Anggaran ■ Realisasi ■ Efisiensi 2025 ■ Pagu Indikatif 2026



\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

\*\*\*) Angka pagu indikatif 2026 diambil dari dokumen KEM-PPKF 2026 dan anggaran 2026 diambil dari Nota Keuangan RAPBN 2026.

## Belanja Per Program

dalam triliun Rp

LKPP 2023

LKPP 2024

APBN 2025

Outlook 2025

RAPBN 2026

Program Ketersediaan, Akses dan  
Konsumsi Pangan Berkualitas  
Program Dukungan Manajemen

0.33  
0.11

36.27  
0.12

0.21  
0.12

2.58  
0.11

0.09  
0.14

Profil Alokasi APBN 2025  
dalam triliun Rp



Menurut Jenis



Menurut Fungsi



Menurut Unit Eselon I



Menurut Sumber Dana



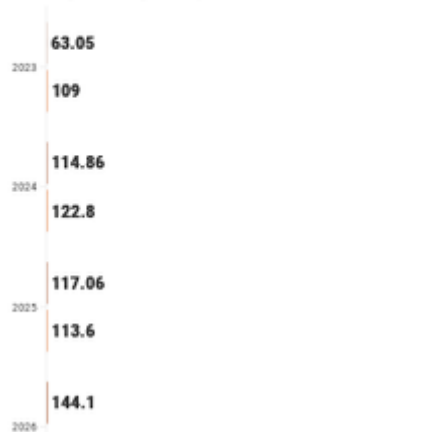
Menurut Program

Anggaran vs Realisasi Per Program

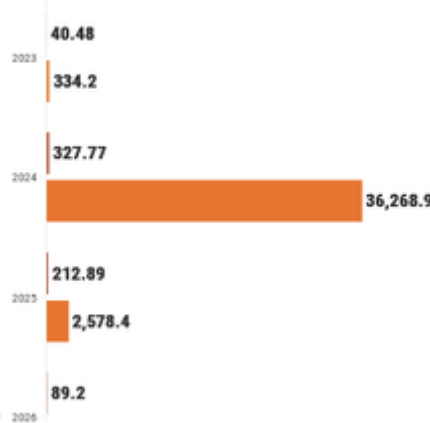
dalam miliar Rp

■ Budget ■ Realisasi

Program Dukungan Manajemen



Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas



## Reliabilitas Anggaran

Artinya anggaran pemerintah bersifat realistis dan diimplementasikan sesuai rencana.

Ukurnya berupa perbandingan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan anggaran awal yang telah disetujui (*PEFA Framework*)

### PI-1. Aggregate Expenditure Outturn

- Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi belanja agregat mendekati jumlah yang disetujui dalam anggaran awal.
- Skor "A" diberikan jika realisasi belanja berada dalam rentang 95%-105% dari anggaran yang disetujui di dua dari tiga tahun terakhir.

**2023 skor D 428,1%**

**2024 skor D 8221,7%**

**D**

**Skor PEFA P1.1 Bapanas**

### PI-2. Expenditure Composition Outturn

- Indikator ini mengevaluasi perubahan alokasi antara kategori anggaran utama selama pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap komposisi belanja.
- Skor "A" diberikan jika varian komposisi belanja kurang dari 5% di dua dari tiga tahun terakhir.

**2023 skor D 72.6%**

**2024 skor D 51.2%**

**D**

**Skor PEFA P1.2.1 Bapanas**



## Highlights Overview Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- Tahun 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp233,30 miliar (193,83% lebih tinggi dari alokasi pagu indikatif 2026, Rp79,4 miliar). Kenaikan anggaran Bapanas pada RAPBN 2026 wajar karena mandatnya di RKP 2026 melebar pada tiga *front* sekaligus. **Pertama**, penguatan cadangan pangan dan tata kelola stok dengan target Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 3,0–3,5 juta ton, yang menuntut pembiayaan sarana-prasarana penyimpanan, sistem penyaluran, serta koordinasi erat dengan Perum BULOG dan pemerintah daerah. **Kedua**, pengendalian inflasi pangan dalam kerangka 4K melalui SPHP, bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah, penguatan CPP/CPPD, kelancaran distribusi (termasuk wilayah 3T/tertinggal–terdepan–terluar) dan kerja sama antar-daerah, serta perbaikan kualitas data dan tata kelola harga—semuanya memperbesar kebutuhan operasi, monitoring, dan sistem data. **Ketiga**, perluasan fortifikasi pangan (cakupan beras fortifikasi 40% dalam bantuan pangan dan empat komoditas wajib fortifikasi) yang membutuhkan standar mutu, inspeksi/pengawasan, dan jaminan distribusi. Kombinasi agenda tersebut mendorong tambahan biaya untuk logistik, pengawasan mutu, penguatan sistem data, dan orkestrasi kebijakan.
- Menurut jenisnya, belanja Bapanas dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja barang dengan distribusi rata-rata 78,68% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja pegawai 16,42%; dan belanja modal 4,90%.
- Menurut fungsinya, belanja Bapanas tahun 2024 seluruhnya digunakan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yaitu sebesar Rp329,96 miliar.
- Belanja Bapanas didistribusikan pada dua program yaitu
  - **Program Dukungan Manajemen**, rata-rata alokasi dalam 3 tahun terakhir sebesar 40,78% dari anggaran tahunan.
  - **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, rata-rata alokasi dalam 3 tahun terakhir sebesar 59,22%.
- Tahun 2024, **Program Dukungan Manajemen** memperoleh pagu Pagu Rp114,86 miliar dengan realisasi Rp122,80 miliar (≈106,9% dari pagu). Artinya belanja operasional/manajerial sedikit melampaui rencana namun masih dalam kisaran deviasi moderat.
- Pagu **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** tahun 2024 mencapai Rp327,77 miliar, tetapi realisasi melonjak menjadi Rp36.268,90 miliar (≈11.065% dari pagu). Lonjakan sangat besar ini hampir pasti dipicu intervensi stabilisasi harga dan pasokan di tengah tahun—misalnya penyaluran bantuan pangan beras, operasi pasar/SPHP, Gerakan Pangan Murah, serta penguatan cadangan—yang ditambah melalui perubahan/rinjian APBN atau dukungan BA BUN dan dicatat pada program ini (Bapanas berperan mengorkestrasi bersama BULOG dan pemda).
- Dalam menjalankan programnya, berdasarkan penilaian reliabilitas anggaran yang merupakan salah satu komponen PEFA Framework dari World Bank. PEFA menilai apakah anggaran pemerintah realistis dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud—diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran awal (baik secara agregat (PI-1) maupun komposisinya (PI-2)). Untuk PI-1 (*Aggregate Expenditure Outturn*), ambang penilaian utamanya: A: 95–105%, B: 90–110%, C: 85–115% dari anggaran awal, dilihat pada “dua dari tiga” tahun terakhir. Dengan tren realisasi dan distribusi anggaran tersebut, kinerja Bapanas di tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa dari sisi kredibilitas, Bapanas efektif sebagai “orchestrator” intervensi, tetapi **pagu awal tidak mencerminkan beban riil** sehingga skor PEFA jatuh (D untuk agregat dan komposisi). Laporan 2024 menunjukkan realisasi didominasi belanja stabilisasi yang “extraordinary”. Reliabilitas anggaran Bapanas dinilai **D** pada kedua indikator. Pada **PI-1**, realisasi menembus **428,1% (2023)** dan **8.221,7% (2024)** dari pagu awal—overspend berlipat-lipat di luar rentang 85–115%—yang mengindikasikan pagu awal sangat rendah lalu ditambah besar lewat revisi

DIPA/BA BUN untuk membiayai **intervensi stabilisasi** (bantuan beras, SPHP/operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan pengelolaan cadangan) saat gejolak harga/pasokan. Pada **PI-2.1**, varian komposisi **72,6% (2023)** dan **51,2% (2024)** menunjukkan pergeseran struktur belanja yang sangat besar dari rencana awal akibat **virement** dan konsentrasi tambahan anggaran pada program “**Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.**”

- Kenaikan anggaran Bapanas pada 2026 rasional karena dibutuhkan untuk tiga mandat RKP yang saling terkait. Pertama, **penguatan cadangan pangan** guna mencapai **Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 3,0–3,5 juta ton**, yang menuntut pembiayaan kebijakan dan operasi pengelolaan stok (peningkatan sarana-prasarana penyimpanan dan logistik, serta penyaluran) beserta koordinasi erat dengan Perum BULOG dan pemerintah daerah. Kedua, **pengendalian inflasi pangan** dalam kerangka 4K melalui **Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)**, bantuan pangan, **Gerakan Pangan Murah**, penguatan **Cadangan Pangan Pemerintah/Daerah (CPP/CPPD)**, kelancaran distribusi termasuk kerja sama antar-daerah, dan perbaikan kualitas **data pangan** serta tata kelola harga—semuanya memerlukan anggaran untuk operasi lapangan, sistem informasi, dan pemantauan. Ketiga, **perluasan fortifikasi pangan** (target **40% beras fortifikasi** pada bantuan pangan dan **empat komoditas wajib fortifikasi**) yang membutuhkan pembiayaan standardisasi, inspeksi/kapasitas unit pelaksana teknis, pengawasan mutu, dan jaminan distribusi. Dengan demikian, alokasi 2026 dipakai untuk memastikan **ketersediaan stok yang andal, stabilitas harga yang terjaga, dan peningkatan kualitas gizi**, sekaligus memperkuat koordinasi, regulasi teknis, dan sistem data nasional yang menjadi peran inti Bapanas.

Dengan riwayat pengelolaan anggaran dan target yang ingin dicapai dari lembaga ini, benang merah anggaran Bapanas 2026 adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu pangan melalui tiga agenda: penguatan **CBP 3,0–3,5 juta ton** (logistik, gudang, penyaluran bersama BULOG–Pemda), **intervensi 4K untuk kendali inflasi** (SPHP, bantuan pangan, GPM, penguatan CPP/CPPD, kelancaran distribusi termasuk wilayah 3T, serta perbaikan data–harga), dan **perluasan fortifikasi** (cakupan beras fortifikasi 40% dan empat komoditas wajib) yang menuntut standardisasi, inspeksi, dan pengawasan mutu.

Ke depan perlu diantisipasi pemisahan sejak awal antara *baseline* dan anggaran stabilisasi berbasis trigger yang jelas (idealnya melalui BUN), disiplin komposisi belanja dengan floor untuk pos inti dan pembatasan virement, serta kesiapan eksekusi melalui pra-tender/kontrak payung/e-catalog, front-loading penyaluran dan SLA pemasok. Risiko gejolak harga global dan cuaca (El-Niño/La-Niña) ditangani lewat *pre-positioning* stok dan kerja sama antar-daerah; sementara akurasi data harga–stok–penyaluran perlu panel terintegrasi near real-time dan pelaporan terpisah antara belanja reguler dan stabilisasi. Pengawasan mutu/fortifikasi diperkuat dengan kapasitas UPT/laboratorium dan *market surveillance*, sedangkan tata kelola dijaga lewat whitelist pemasok, paket kecil multi-vendor, pelibatan APIP/Itjen, dan kanal aduan publik—semuanya disinergikan dalam joint planning & delivery dengan BULOG, Kementan, Kemendag/Perindustrian, Perhubungan/PUPR, dan pemerintah daerah.

# OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 BADAN KARANTINA INDONESIA

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**1.656,00**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**1.503,1**

APBN 2025  
(miliar Rp)

**1.420,52**

Outlook 2025  
(miliar Rp)

**1.213,1**

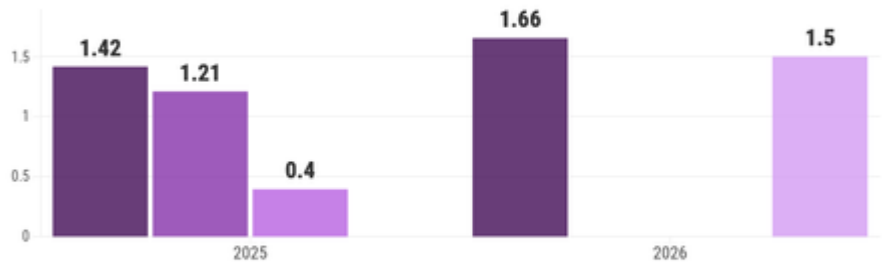
LKPP 2024  
(miliar Rp)

**-**

## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ Anggaran ■ Realisasi ■ Efisiensi 2025 ■ Pagu Indikatif 2026



\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

\*\*\*) Angka pagu indikatif 2026 diambil dari dokumen KEM-PPKF 2026 dan anggaran 2026 diambil dari Nota Keuangan RAPBN 2026.

## Anggaran Per Program

dalam miliar Rp

Program Dukungan Manajemen

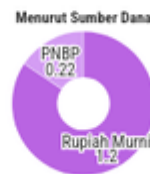
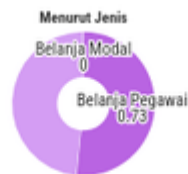


Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas



## Profil Alokasi APBN 2025

dalam triliun Rp



## Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

■ Capaian 2024 ■ Target 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian vs Target 2024	Keterangan
Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	291	Tercapai
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	334	Tercapai
	Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensia hayati, jenis asing infasif, produk rekayasa genetik, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	24.83	Belum Tercapai
Terwujudnya kebijakan perkarantinaan yang efektif	Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan	109.55	Tercapai
	Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan	69.97	Belum Tercapai





## Highlights Overview Pagu Anggaran Badan Karantina Indonesia 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- **Badan Karantina Indonesia (Barantin)** adalah lembaga pemerintah di bawah Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Barantin berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan, mengelola aset negara, serta melakukan pengawasan dan dukungan administratif serta substantif bagi seluruh unit di lingkungannya.
- Tahun 2026, Barantin memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1.656,0 miliar (10,1% lebih besar dari pagu indikatif 2026. Rp1.503,1 miliar). Di tahun 2025, lembaga ini mengalami efisiensi anggaran yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Atas efisiensi tersebut, tahun 2025, nilai belanja yang dapat dimanfaatkan oleh Barantin hanya sebesar Rp395,88 miliar (hanya 27,9% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Barantin dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan distribusi 51,6% dari total anggaran tahun 2025; belanja barang 48,3%; dan belanja modal <1%.
- Menurut fungsinya, belanja Barantin tahun 2025 seluruhnya mendukung fungsi ekonomi dengan nilai Rp1.420,5 miliar.
- Distribusi belanja Barantin didominasi oleh program **Dukungan Manajemen** (83% dari total anggaran tahun 2025), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal. **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, sebagai *core business* Barantin, hanya menerima alokasi sebesar 17% dari total anggaran 2025.
- Di tahun 2026, **Program Dukungan Manajemen** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar (Rp1.178,43 miliar atau 78,40% dari total anggaran).
- **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** mengalami peningkatan alokasi di 2026, mencapai Rp464,6 miliar —menunjukkan realokasi anggaran atau penguatan fungsi utama Barantin.
- Sehubungan karena Barantin merupakan lembaga baru maka tren realisasinya belum terdapat datanya. Dengan kondisi anggaran tersebut, Barantin telah menyusun laporan kinerja sebagai titik awal pendirian lembaga dan penentuan *baseline* kinerjanya. Kinerja Barantin 2024 menunjukkan kondisi berikut:
  - Jumlah temuan HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina), HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina), dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti mencapai 291 kasus, melebihi target sebesar 280, yang menunjukkan bahwa Barantin memiliki kapasitas respons yang baik dalam menindaklanjuti temuan penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan di dalam negeri secara cepat dan tepat.
  - Jumlah temuan di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditindaklanjuti tercatat sebanyak 334 kasus, melampaui target 320 kasus, mencerminkan efektivitas sistem deteksi dan respon karantina di pintu-pintu masuk dan keluar negara, termasuk pelabuhan dan bandara.
  - Persentase tersedianya kebijakan karantina sesuai kebutuhan mencapai 109,55%, melampaui target 100%, yang menunjukkan bahwa Barantin mampu merumuskan dan menyediakan kebijakan teknis karantina secara adaptif, sesuai dinamika risiko dan kebutuhan nasional.

- Persentase pelaksanaan layanan karantina secara efektif dan efisien berada pada angka 156,25%, melebihi target 150%, yang mengindikasikan bahwa layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan telah dilaksanakan dengan mutu dan kecepatan yang sangat baik, sesuai standar pelayanan publik.
- Persentase penyelesaian kasus pelanggaran karantina mencapai 195%, melebihi target 180%, yang mencerminkan kemampuan Barantin dalam melakukan penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran karantina secara optimal dan responsif.
- Persentase tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian keamanan dan kelayakan produk biologis di pintu masuk atau keluar hanya mencapai 24,83% dari target 30%, menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap ancaman keamanan hayati dan pangan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, prosedur teknis, atau kompleksitas pengujian laboratorium.
- Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina sebesar 69,97%, belum mencapai target 75%, menandakan bahwa partisipasi publik dalam sistem karantina masih perlu ditingkatkan, terutama melalui strategi sosialisasi, edukasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan.

**Sebagian target Barantin terlampaui secara signifikan – perlu peninjauan kembali penetapan target.** Beberapa indikator seperti: Pelayanan karantina (156,25% dari target); Penyelesaian pelanggaran (195%); Penyediaan kebijakan (109,55%) menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mungkin terlalu konservatif atau tidak mencerminkan kapasitas riil organisasi, sehingga kurang mendorong perbaikan kinerja secara progresif. Ini mengindikasikan perlunya:

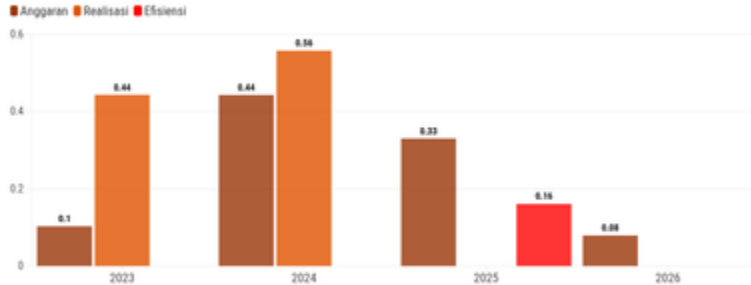
- Penyesuaian metodologi penetapan target berbasis data historis dan kapasitas actual
- Penyusunan target yang lebih ambisius namun realistis (SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*)

Pengelolaan anggaran Barantin masih dalam tahap awal konsolidasi kelembagaan. **Meski menunjukkan kinerja teknis yang cukup menjanjikan di sejumlah aspek, struktur belanjanya masih sangat administratif dan belum cukup reflektif terhadap prioritas strategis lembaga.** Penyesuaian dalam proporsi anggaran, sistem penetapan target, dan penguatan kapasitas implementasi teknis perlu segera dilakukan agar Barantin dapat berperan optimal sebagai garda depan sistem biosekuriti nasional.

# Overview Pagu Indikatif BADAN PANGAN NASIONAL

## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp



\*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

## PAGU INDIKATIF 2026

Rp79,40 miliar

## APBN 2025

Rp329.96 miliar

## EFISIENSI APBN 2025

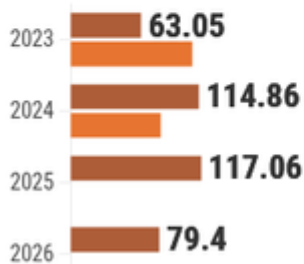
Rp160.90 miliar

## Anggaran vs Realisasi Per Program

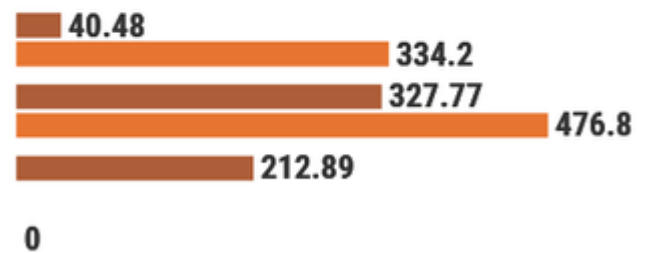
dalam miliar Rp

■ Budget ■ Realisasi

### Program Dukungan Manajemen



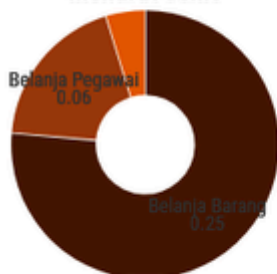
### Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas



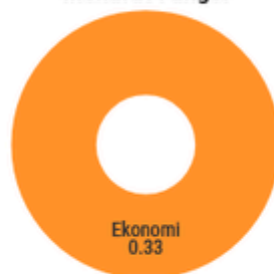
## Profil Alokasi APBN 2024

dalam triliun Rp

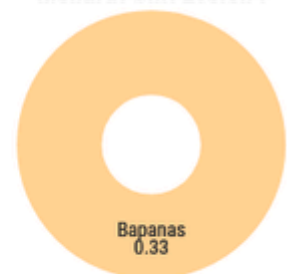
### Menurut Jenis



### Menurut Fungsi



### Menurut Unit Eselon I



### Menurut Sumber Dana






### Menurut Program



## Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024

■ Capaian 2024 ■ Target 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tren Capaian	Capaian vs Target 2024	Keterangan
Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan		113.44 120	Belum Tercapai
	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan		131.67 140.74	Belum Tercapai
	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan		139.17 129.21	Tercapai
	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan		100 100	Tercapai
Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga keekonomian		66.67 85	Belum Tercapai & Perlu Kerja Keras
	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian		92.31 80	Tercapai
	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional perkuartal maksimum 10%		27 27	Tercapai
	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%		76.67 80	Belum Tercapai
	Inflasi Pangan Bergejolak		4 4	Tercapai
Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan		12.06 12	Tercapai
	Prevalence of Undernourishment (PoU)		8.27 8.27	Belum Tercapai & Perlu Kerja Keras
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan		92.52 90	Tercapai
	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi		79.41 70	Tercapai
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan		98.21 95	Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional 2022-2024, diolah



## Highlights Overview Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- Tahun 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar **Rp79,40 miliar** (24,06% dari alokasi 2025, Rp329,96 miliar). Penurunan alokasi ini didorong oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh Badan Pangan Nasional mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp160,90 miliar (48,76% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Bapanas dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja barang dengan distribusi rata-rata 78,68% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja pegawai 16,42%; dan belanja modal 4,90%.
- Menurut fungsinya, belanja Bapanas tahun 2024 seluruhnya digunakan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yaitu sebesar Rp329,96 miliar.
- Belanja Bapanas didistribusikan pada dua program yaitu
  - **Program Dukungan Manajemen**, rata-rata alokasi dalam 3 tahun terakhir sebesar 40,78% dari anggaran tahunan.
  - **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, rata-rata alokasi dalam 3 tahun terakhir sebesar 59,22%.
- **Program Dukungan Manajemen** dalam 2 (dua) tahun terakhir memiliki realisasi yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan anggaran awal, realisasi Bapanas tahun 2023 mencapai 172,88% namun, dibandingkan dengan anggaran setelah revisi mencapai 91%. Sedangkan untuk tahun 2024, realisasi terhadap anggaran awal sebesar 70%. Realisasi ini memiliki kegiatan utama yaitu dukungan manajemen dan teknis lainnya Bapanas.
- **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** memiliki realisasi yang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir. Dibandingkan dengan pagu awal, realisasi anggaran mencapai 172,88% di tahun 2023 dan 145,47% di tahun 2024. Tingginya realisasi disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran terhadap Bapanas dalam rangka melaksanakan penyaluran CPP melalui bantuan pangan.
- Dengan tren realisasi dan distribusi anggaran tersebut, kinerja Bapanas tahun 2024 menunjukkan kondisi sebagai berikut:
  1. **Rasio ketersediaan komoditas pangan terhadap kebutuhan** tercatat sebesar **113,44%**, masih di bawah target **120%**. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya produksi dan realisasi impor pada beberapa komoditas. Meskipun demikian, tingkat ketersediaan tetap tergolong aman karena masih melebihi kebutuhan nasional.
  2. **Ketersediaan protein berdasarkan rasio Angka Kecukupan Protein (AKP)** mencapai **131,67%**, belum memenuhi target **140,74%**. Capaian ini menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani di masyarakat masih rendah dan kurang beragam, yang terutama disebabkan oleh keterbatasan daya beli. Bapanas perlu memperkuat strategi intervensi untuk mendorong konsumsi protein bergizi.
  3. **Angka Kecukupan Energi (AKE)** berhasil mencapai **139,17%**, melampaui target **129,21%**. Ini menandakan bahwa secara umum kebutuhan energi masyarakat telah terpenuhi sesuai standar Kementerian Kesehatan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian AKP, terlihat bahwa ketersediaan pangan lebih mencukupi dari sisi jumlah (energi) dibanding dari sisi kualitas (protein).

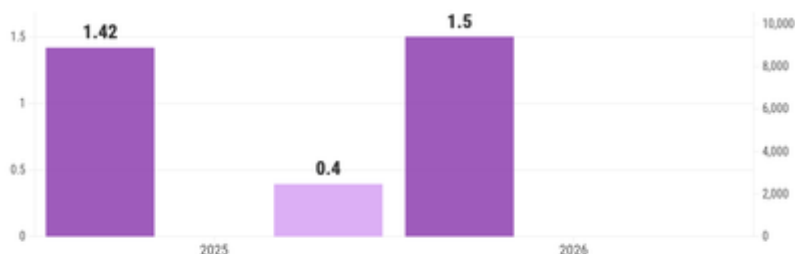
4. **Seluruh komoditas pangan yang menjadi kewenangan Bapanas** telah tercakup dalam sistem cadangan pangan nasional, dengan rasio capaian **100%**, sesuai target. Ini memperkuat kesiapan pemerintah dalam pengelolaan cadangan pangan melalui BUMN terkait.
5. **Rasio stabilitas harga di tingkat produsen** terhadap HAP/HPP masih **66,67%**, lebih rendah dari target **85%**. Ketidakstabilan harga ini mencerminkan tantangan dalam menjaga harga yang menguntungkan produsen. Bapanas bersama K/L lain perlu mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga di sisi hulu.
6. **Stabilitas harga di tingkat konsumen** menunjukkan capaian **92,31%**, melampaui target **80%**, yang berarti harga pangan bagi masyarakat relatif terkendali sepanjang tahun. Meskipun begitu, adanya kesenjangan dengan harga produsen menandakan ketimpangan tata niaga yang perlu dibenahi.
7. **Jumlah provinsi dengan disparitas harga konsumen di bawah 10% dari rata-rata nasional** mencapai **27 provinsi**, sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan kestabilan harga antarwilayah relatif terjaga sepanjang tahun berjalan.
8. **Stabilitas harga antarwaktu** (per kuartal) di tingkat konsumen hanya tercapai **76,67%**, masih di bawah target **80%**. Artinya, masih terdapat fluktuasi harga antarperiode yang memerlukan penyesuaian kebijakan pasokan dan distribusi.
9. **Tingkat inflasi pangan bergejolak tahun 2024** sangat terkendali di angka **0,12%**, jauh di bawah batas atas target **4,0% ±1**, menunjukkan efektivitas stabilisasi harga pangan secara keseluruhan.
10. **Persentase kabupaten/kota yang tergolong rentan rawan pangan** tercatat sebesar **12,06%**, sedikit di atas target **12%**. Meskipun hanya berbeda tipis, hal ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi di wilayah-wilayah rawan.
11. **Prevalensi kekurangan konsumsi kalori (*Prevalence of Undernourishment/PoU*)** berada di level **8,27%**, masih jauh dari target **5%**. Ini menandakan adanya masalah ketahanan pangan kronis yang memerlukan pendekatan lintas sektor dari sembilan K/L terkait.
12. **Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu** tercapai sebesar **92,52%**, melebihi target **90%**. Ini mencerminkan efektivitas pengawasan pangan di sisi pre- dan post-market.
13. **Standarisasi lembaga keamanan dan mutu pangan di tingkat provinsi (OKKPD)** telah mencapai **79,41%**, melampaui target **70%**. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam pengawasan keamanan pangan.
14. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** sebagai indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat telah mencapai **98,21%**, melebihi target **95%**. Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat mulai mengarah pada keragaman dan keseimbangan gizi yang lebih baik.

Pengelolaan anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan responsivitas yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program teknis, terutama dalam penyaluran bantuan pangan dan penguatan cadangan pangan nasional. Namun, penurunan tajam pagu indikatif tahun 2026 hingga hanya 24% dari tahun sebelumnya serta keterbatasan ruang belanja efektif akibat kebijakan efisiensi menuntut Bapanas untuk semakin selektif dan terfokus pada intervensi yang berdampak langsung. Kinerja substansial seperti kestabilan harga konsumen, pengendalian inflasi pangan, dan mutu pangan menunjukkan capaian positif, tetapi masih terdapat tantangan serius dalam hal kualitas konsumsi pangan (protein), ketimpangan harga di tingkat produsen, serta tingginya prevalensi *undernourishment* dan kerentanan rawan pangan. Untuk itu, Bapanas perlu memperkuat perencanaan berbasis prioritas, mengoptimalkan peran dalam stabilisasi harga di hulu, dan mendorong sinergi lintas sektor guna menjamin ketahanan dan gizi pangan nasional yang lebih berkelanjutan.

## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ Anggaran ■ Efisiensi



\*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

## PAGU INDIKATIF 2026

Rp1.503,1 miliar

## APBN 2025

Rp1.420,52 miliar

## EFISIENSI APBN 2025

Rp395,88 miliar

### Program Dukungan Manajemen

2025

1,178.43

2026

1,038.50

### Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

2025

242.08

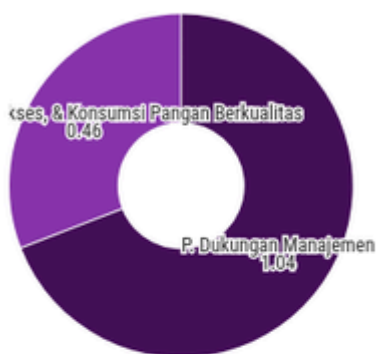
2026

464.60

## Profil Alokasi APBN 2025

dalam triliun Rp

### Menurut Program



### Menurut Jenis



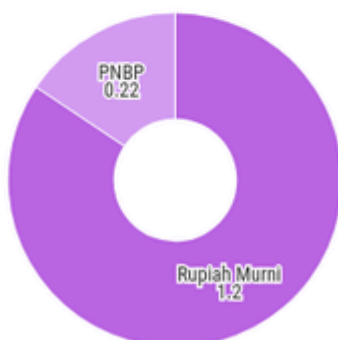
### Menurut Fungsi



### Menurut Unit Eselon I



### Menurut Sumber Dana



## Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

■ Capaian 2024 ■ Target 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian vs Target 2024	Keterangan
Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	291	Tercapai
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	334	Tercapai
	Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasif, produk rekayasa genetik, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran	24.83	Belum Tercapai
Terwujudnya kebijakan perkarantinaan yang efektif	Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan	109.55	Tercapai
Terwujudnya layanan perkarantinaan yang profesional	Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien	156.25	Tercapai
Meningkatnya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang partisipatif	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan	195	Tercapai
	Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan	69.97	Belum Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja Badan Karantina Indonesia 2024 diolah





## Highlights Overview Pagu Indikatif Badan Karantina Indonesia 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- **Badan Karantina Indonesia (Barantin)** adalah lembaga pemerintah di bawah Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Barantin berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan, mengelola aset negara, serta melakukan pengawasan dan dukungan administratif serta substantif bagi seluruh unit di lingkungannya.
- Tahun 2026, Barantin memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp1.503,1 miliar (105,8% dari alokasi 2025, Rp1.420,52 miliar). Di tahun 2025, lembaga ini mengalami efisiensi anggaran yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Atas efisiensi tersebut, tahun 2025, nilai belanja yang dapat dimanfaatkan oleh Barantin hanya sebesar Rp395,88 miliar (hanya 27,9% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Barantin dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan distribusi 51,6% dari total anggaran tahun 2025; belanja barang 48,3%; dan belanja modal <1%.
- Menurut fungsinya, belanja Barantin tahun 2025 seluruhnya mendukung fungsi ekonomi dengan nilai Rp1.420,5 miliar.
- Distribusi belanja Barantin didominasi oleh program **Dukungan Manajemen** (83% dari total anggaran tahun 2025), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal. **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, sebagai *core business* Barantin, hanya menerima alokasi sebesar 17% dari total anggaran 2025.
- Di tahun 2026, **Program Dukungan Manajemen** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar (Rp1.178,43 miliar atau 78,40% dari total anggaran).
- **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** mengalami peningkatan alokasi di 2026, mencapai Rp464,6 miliar —menunjukkan realokasi anggaran atau penguatan fungsi utama Barantin.
- Sehubungan karena Barantin merupakan lembaga baru maka tren realisasinya belum terdapat datanya. Dengan kondisi anggaran tersebut, Barantin telah menyusun laporan kinerja sebagai titik awal pendirian lembaga dan penentuan *baseline* kinerjanya. Kinerja Barantin 2024 menunjukkan kondisi berikut:
  - Jumlah temuan HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina), HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina), dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti mencapai 291 kasus, melebihi target sebesar 280, yang menunjukkan bahwa Barantin memiliki kapasitas respons yang baik dalam menindaklanjuti temuan penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan di dalam negeri secara cepat dan tepat.
  - Jumlah temuan di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditindaklanjuti tercatat sebanyak 334 kasus, melampaui target 320 kasus, mencerminkan efektivitas sistem deteksi dan respon karantina di pintu-pintu masuk dan keluar negara, termasuk pelabuhan dan bandara.
  - Persentase tersedianya kebijakan karantina sesuai kebutuhan mencapai 109,55%, melampaui target 100%, yang menunjukkan bahwa Barantin mampu merumuskan dan menyediakan kebijakan teknis karantina secara adaptif, sesuai dinamika risiko dan kebutuhan nasional.

- Persentase pelaksanaan layanan karantina secara efektif dan efisien berada pada angka 156,25%, melebihi target 150%, yang mengindikasikan bahwa layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan telah dilaksanakan dengan mutu dan kecepatan yang sangat baik, sesuai standar pelayanan publik.
- Persentase penyelesaian kasus pelanggaran karantina mencapai 195%, melebihi target 180%, yang mencerminkan kemampuan Barantin dalam melakukan penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran karantina secara optimal dan responsif.
- Persentase tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian keamanan dan kelayakan produk biologis di pintu masuk atau keluar hanya mencapai 24,83% dari target 30%, menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap ancaman keamanan hayati dan pangan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, prosedur teknis, atau kompleksitas pengujian laboratorium.
- Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina sebesar 69,97%, belum mencapai target 75%, menandakan bahwa partisipasi publik dalam sistem karantina masih perlu ditingkatkan, terutama melalui strategi sosialisasi, edukasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan.

**Sebagian target Barantin terlampaui secara signifikan – perlu peninjauan kembali penetapan target.** Beberapa indikator seperti: Pelayanan karantina (156,25% dari target); Penyelesaian pelanggaran (195%); Penyediaan kebijakan (109,55%) menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mungkin terlalu konservatif atau tidak mencerminkan kapasitas riil organisasi, sehingga kurang mendorong perbaikan kinerja secara progresif. Ini mengindikasikan perlunya:

- Penyesuaian metodologi penetapan target berbasis data historis dan kapasitas actual
- Penyusunan target yang lebih ambisius namun realistis (SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*)

Pengelolaan anggaran Barantin masih dalam tahap awal konsolidasi kelembagaan. **Meski menunjukkan kinerja teknis yang cukup menjanjikan di sejumlah aspek, struktur belanjanya masih sangat administratif dan belum cukup reflektif terhadap prioritas strategis lembaga.** Penyesuaian dalam proporsi anggaran, sistem penetapan target, dan penguatan kapasitas implementasi teknis perlu segera dilakukan agar Barantin dapat berperan optimal sebagai garda depan sistem biosekuriti nasional.

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp



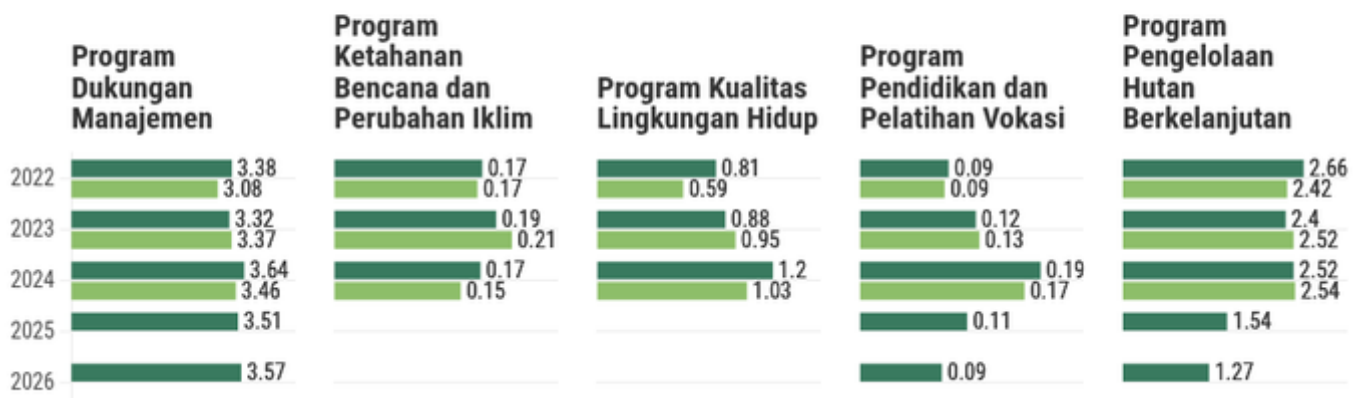
\*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

### Anggaran vs Realisasi Per Program

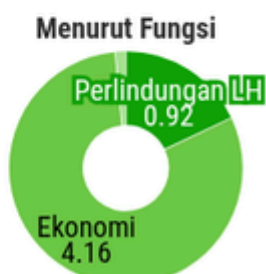
dalam triliun Rp

■ Budget ■ Realisasi



### Profil Alokasi APBN 2024

dalam triliun Rp



### PAGU INDIKATIF 2026

Rp4.933,30 miliar

### APBN 2025

Rp5.158,51 miliar


















### EFISIENSI APBN 2025

Rp1.216,99 miliar

Kementerian Kehutanan merupakan pecahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan tahun 2025 di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

## Baseline Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025 - Capaian Kinerja 2024

■ Capaian 2023 ■ Capaian 2024 ■ Target 2024

Indikator Kinerja	Tren Capaian Kinerja	Capaian 2024 vs Target 2024	Target 2025
Penurunan laju deforestasi (juta ha/tahun)			0,20
Produksi kayu bulat (juta m3)			57,40
Produksi hasil hutan bukan kayu (kumulatif ribu ton)			2.500,00
Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional (triliun Rp)			162,10
Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting (miliar USD)			16,00
Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional KLHK (triliun Rp)			7,06
Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) - (kumulatif juta ha)			3,10
Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (kumulatif juta ha)			7,11
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)			3.800,00
Luas kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan (ribu ha)			196,00

Sumber: Renstra KLHK 2020-2024; Laporan Kinerja KLHK 2022, diolah



## Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Kehutanan 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- **Kementerian Kehutanan (Kemenhut)** merupakan lembaga hasil pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemisahan ini dimulai sejak dimulainya pemerintahan Prabowo-Gibran di 2025 lalu. **Kemenhut** bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Perannya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan, termasuk konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta penguatan industri hasil hutan. Selain itu, kementerian ini juga melakukan supervisi teknis, koordinasi internal, pengelolaan aset, pengawasan, penyuluhan, pengembangan SDM, dan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Presiden.
  - Tahun 2026, Kemenhut memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp4.933,38 miliar (95,6% dari alokasi 2025, Rp5.158,51 miliar). Penurunan alokasi ini didorong oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh Kemenhut mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp1.216,99 miliar (hanya 23,6% dari anggaran 2025).
  - Menurut jenisnya, belanja Kemenhut dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan porsi 43,7% dari total anggaran 2025; belanja barang 55,2%; dan belanja modal 1,1%.
  - Menurut fungsinya, belanja Kemenhut tahun 2025 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp4.158,74 miliar (80,6%). Selain itu, Kemenhut juga menjalankan fungsi lainnya yaitu, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp923,77 miliar (17,9%) dan fungsi pendidikan Rp76 miliar (1,5%).
  - Distribusi belanja Kemenhut sangat terkonsentrasi pada dua program utama:
    - **Dukungan Manajemen** (sekitar 68% dari total anggaran tahunan), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal.
    - **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**, sebagai *core business* Kemenhut, memperoleh alokasi sekitar 29,8% dari total anggaran 2025 sebelum efisiensi.
- Terdapat satu lagi program yang dijalankan Kemenhut, **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, yang hanya mendapat alokasi 2,2% dari alokasi anggaran 2025.
- Tahun 2026 (berdasarkan pagu indikatif awal), **Program Dukungan Manajemen** memperoleh kenaikan alokasi menjadi Rp3.574,4 miliar dari Rp3.507,9 miliar di 2025, **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** justru mengalami penurunan mencapai Rp1.272,6 dari Rp1.537,68 di 2025.
  - Dengan distribusi anggaran tersebut, kinerja Kemenhut dimulai dengan *baseline* 2024 sebagai berikut:
    - Luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023 mencapai 125.664.549,85 ha, luasan tersebut jika dibagi menurut fungsinya terdiri atas:
      1. Kawasan konservasi perairan mencapai 5.321.321 ha
      2. Kawasan konservasi darat mencapai 22.090.903,76 ha
      3. Hutan lindung mencapai 29.520.962,98 ha
      4. Hutan produksi terbatas mencapai 26.798.799,89 ha
      5. Hutan produksi mencapai 29.171.184,19 ha
      6. Hutan produksi yang Dapat Dikonversi mencapai 12.761.378,03 ha.

Di tahun 2024, luas kawasan hutan daratan dan perairan mencapai 125.541.298,80 ha.

- Penurunan laju deforestasi berhasil ditekan hingga mencapai 0,2 juta hektare per tahun, lebih rendah dari target sebesar 0,31 juta hektare, yang mencerminkan efektivitas pengendalian konversi hutan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga tutupan hutan di tengah tekanan ekspansi lahan, dan target 2025 yang tetap sebesar 0,2 juta ha mengindikasikan pendekatan yang realistis untuk mempertahankan capaian tersebut.
- Produksi kayu bulat mencapai 60 juta meter kubik, melampaui target sebesar 57,4 juta m<sup>3</sup>, menunjukkan bahwa produktivitas hutan produksi cukup tinggi dan stabil. Target 2025 tidak berubah, menandakan bahwa capaian saat ini dianggap sebagai batas produksi berkelanjutan yang masih memperhatikan prinsip kelestarian.
- Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) melonjak hingga 3.573 ribu ton, jauh melampaui target 2.500 ribu ton, menandakan bahwa subsektor HHBK berkontribusi signifikan dan menjadi potensi unggulan kehutanan. Namun, penurunan target 2025 ke 2.000 ribu ton terlihat tidak selaras dengan tren capaian positif, sehingga perencanaan target perlu ditinjau ulang agar lebih mencerminkan potensi sektor ini.
- Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting tercapai sebesar 16 miliar USD, sesuai target, namun tidak menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan stagnasi ekspor kehutanan, kemungkinan dipengaruhi kondisi pasar global. Target 2025 yang tetap menunjukkan pendekatan konservatif dan perlunya strategi baru untuk memperluas pasar.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kehutanan mencapai Rp7,5 triliun, melebihi target Rp7,06 triliun, menunjukkan peningkatan kontribusi fiskal sektor kehutanan. Target 2025 hanya sedikit dinaikkan menjadi Rp7,48 triliun, memberi ruang pertumbuhan namun tetap berhati-hati terhadap fluktuasi produksi dan pasar.
- Luas kawasan hutan yang dilepas untuk program TORA mencapai 3,1 juta hektare, sedikit melampaui target 3 juta hektare, yang menandakan komitmen terhadap agenda reforma agraria berjalan sesuai rencana. Target 2025 dipertahankan pada angka yang sama, mengindikasikan kelanjutan kebijakan redistribusi lahan.
- Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat tercapai sebesar 7,1 juta hektare, melebihi target 6,69 juta hektare, menandakan bahwa program perhutanan sosial menunjukkan penguatan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Target 2025 dinaikkan ke 7,11 juta hektare, sejalan dengan tren positif tersebut.
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tercatat sebesar 18.025 hektare, melebihi target 17.500 hektare, namun menunjukkan tren perlambatan dari tahun sebelumnya. Target 2025 justru diturunkan secara signifikan ke 3.800 hektare, kemungkinan mencerminkan refokus strategi, keterbatasan anggaran, atau perubahan pendekatan rehabilitasi.
- Luas kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan pada 2024 mencapai 1.137,98 ribu hektare, lebih rendah dari target 1.196 ribu hektare. Dalam konteks ini, penurunan merupakan hal positif karena menunjukkan pengurangan kejadian kebakaran atau peningkatan efektivitas pencegahan. Target 2025 ditetapkan jauh lebih rendah (196 ribu ha), yang menandakan peningkatan ekspektasi terhadap kontrol dini dan sistem peringatan dini kebakaran.
- Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional mencapai Rp145,1 triliun, melebihi target Rp137,2 triliun, mencerminkan bahwa sektor kehutanan masih memiliki kekuatan ekonomi signifikan. Peningkatan target 2025 menjadi Rp162,1 triliun menunjukkan adanya optimisme terhadap ekspansi sektor ini, termasuk potensi kontribusi dari ekowisata, jasa lingkungan, dan hasil hutan bernilai tambah.

- Tren kinerja secara umum meningkat dan stabil sejak 2023 → menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pelaksanaan program dan koordinasi sektor kehutanan. Sebagian besar capaian KLHK 2024 melampaui target menunjukkan bahwa banyak target terlalu konservatif. Ini bisa berarti baseline belum memperhitungkan kapasitas aktual atau potensi sektor kehutanan.
- Beberapa target 2025 malah diturunkan, meski capaian 2024 sangat baik (misalnya HHBK dan rehabilitasi lahan), yang menimbulkan pertanyaan konsistensi antara capaian, potensi, dan perencanaan ke depan.

Pengelolaan anggaran Kemenhut **belum sepenuhnya mencerminkan orientasi kinerja. Sebagian besar anggaran masih didominasi belanja dukungan manajemen (68%)**, sementara alokasi untuk program inti pengelolaan hutan justru menurun di 2026. Efisiensi fiskal yang membatasi ruang belanja riil (hanya 23,6% di 2025) menuntut selektivitas tinggi dalam pemanfaatan anggaran.

Padahal, kinerja sektor kehutanan tahun 2024 menunjukkan capaian yang melampaui target pada sebagian besar indikator utama, **namun tidak selalu direspons secara progresif dalam penetapan target 2025**, mencerminkan ketidaksinkronan antara hasil dan perencanaan.

Untuk memastikan efektivitas, **alokasi anggaran perlu lebih diarahkan pada program berdampak langsung**, seperti rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, dan peningkatan PNBP, yang terbukti memiliki *leverage* tinggi terhadap kinerja nasional kehutanan.

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp



\*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

### PAGU INDIKATIF 2026

Rp13.757,1 miliar

### APBN 2025

Rp29.373,98 miliar

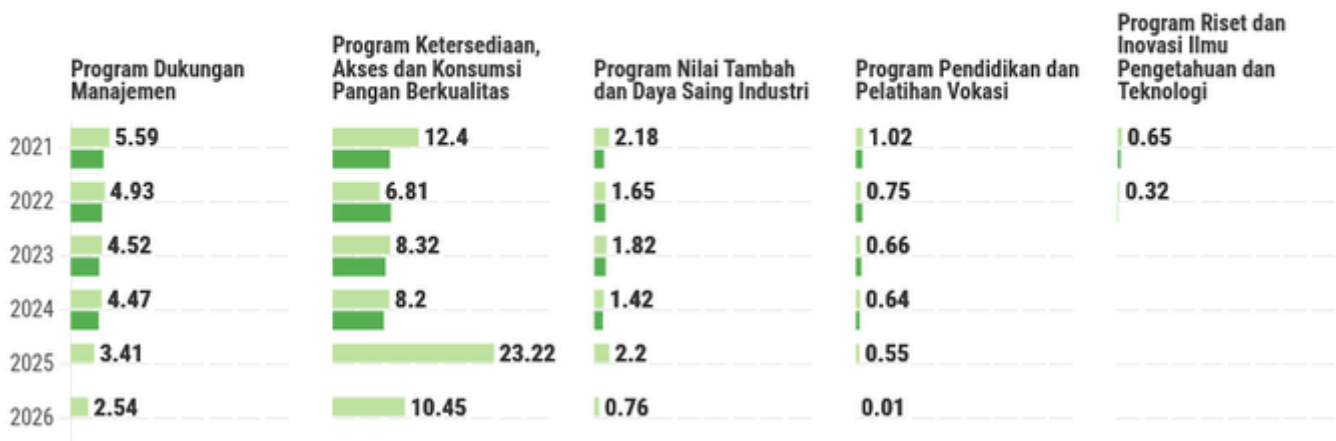
### EFISIENSI APBN 2025

Rp10.282,96 miliar

### Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

Budget Realisasi



### Distribusi Alokasi APBN 2024

dalam triliun Rp

#### Menurut Program



#### Menurut Jenis



#### Menurut Fungsi



#### Menurut Unit Eselon I










#### Menurut Sumber Dana





Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024

Capaian 2024 Target 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian 2024 vs Target 2024		Keterangan
PN 1. PP 3. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri (%)		1.38	1.33	Tercapai
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (%)		92.53	91.94	Tercapai
	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani (%)		92.37	89.87	Tercapai
	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)		80.62	80.5	Tercapai
	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (%)		53.41	54.47	Belum Tercapai
	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian (%)		96.68	94.62	Tercapai
PN 1. PP 6. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian (%)		93.07	91.19	Tercapai
	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional (%)		15.44		Tercapai
PN 1. PP 6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)		97.5	90	Tercapai
	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)		22.06	22	Tercapai
	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi		90.24	90	Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja Kementan 2024, data diolah

## Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Pertanian 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- Tahun 2026, Kementerian Pertanian memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp13.757,1 miliar (46,8% dari alokasi 2025, Rp29.373,98 miliar). Penurunan alokasi ini didorong dan didasari oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh Kementerian Pertanian mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp10.282,96 miliar (hanya 35 % dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja Kementerian Pertanian dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja barang dengan distribusi rata-rata 83,54% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja pegawai 12,96%; dan belanja modal 3,5%.
- Menurut fungsinya, belanja Kementerian Pertanian tahun 2024 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp28,99 miliar (98,7 %) sisanya fungsi pendidikan Rp374,97 juta (1,3%).
- Distribusi belanja Kementerian Pertanian terkonsentrasi pada dua program yaitu:
  - **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** (rata-rata 61,48% dari total anggaran tahunan)
  - **Dukungan Manajemen** (rata-rata 24,93% dari total anggaran tahunan)Sementara itu, **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** mendapat alokasi yang cukup kecil yakni dibawah 10%. Adapun Program Riset dan teknologi tidak lagi dianggarkan sejak tahun 2023 karena berpindahnya fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar yakni 47-79% hingga tahun 2025 dengan realisasi rata-rata tahun 2021-2023 sebesar 93,22%. Untuk tahun 2025, terjadi lonjakan alokasi anggaran pada Kementerian Pertanian hingga 99% dibanding anggaran tahun 2024. Atas peningkatan tersebut, alokasi untuk Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mencapai Rp23,215 miliar (79,04% dari anggaran tahun 2025). Peningkatan tersebut bertujuan untuk mendukung kebijakan strategis tahun 2025 antara lain: (1) Peningkatan produktivitas dan cetak sawah; (2) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan; (3) Pengembangan pangan lokal dan bioforkasi; (4) Satu data pangan dan tata kelola pangan; (5) Keterlusuran (*iraceability*); dan (6) *biosecurity*. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah berfokus pada penguatan fungsi utamanya.
- **Program Dukungan Manajemen** menunjukkan tren penurunan jumlah anggaran dari tahun 2021 hingga 2025 dengan realisasi rata-rata tahun 2021-2023 sebesar 89,56%.
- **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** mendapat alokasi anggaran rata-rata sekitar 9% dari total anggaran tahunan dengan rata-rata realisasi tahun 2021-2023 sebesar 87,37%
- **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** mendapat alokasi anggaran yang paling kecil yaitu rata-rata 3,42% dari anggaran tahunan hingga tahun 2025 dengan rata-rata realisasi tahun 2021-2023 sebesar 110,04%.

- Dengan tren realisasi dan distribusi anggaran tersebut, kinerja Kementan tahun 2024 menunjukkan prestasi sebagai berikut:

1. **Ketersediaan pangan strategis dalam negeri** mengalami peningkatan sebesar **1,38%**, yang berarti telah **melampaui target 1,33%**. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya produksi komoditas hortikultura dan peternakan.
2. **Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi standar keamanan pangan** mencapai **92,53%**, melebihi target yang ditetapkan sebesar **91,94%**. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Pertanian dalam menjaga mutu dan keamanan pangan hewani.
3. **Penanganan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim** berhasil dilaksanakan sebesar **92,22%**, yang melampaui target **89,87%**. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pengendalian OPT serta peningkatan kapasitas teknis di lapangan.
4. **Wilayah yang berhasil dikendalikan dari penyakit hewan menular strategis** tercatat sebesar **80,62%**, sedikit di atas target **80,5%**. Ini menandakan kinerja yang baik dalam mengurangi risiko penyakit hewan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun keresahan masyarakat.
5. **Tingkat pemenuhan prasarana pertanian** hanya mencapai **53,41%**, masih berada di bawah target sebesar **54,47%**. Kesenjangan ini sebagian disebabkan oleh perubahan kebijakan dan *refocusing* anggaran ke kegiatan lain.
6. **Pemanfaatan sarana produksi pertanian** tercapai sebesar **96,68%**, melebihi target **94,62%**. Capaian ini ditopang oleh peningkatan penggunaan fasilitas sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, serta dukungan pada subsektor hortikultura dan peternakan.
7. **Sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian** telah dimanfaatkan sebesar **93,07%**, yang melampaui target **91,19%**. Ini menunjukkan dorongan kuat terhadap pengembangan infrastruktur pascapanen yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani.
8. **Nilai ekspor produk pertanian nasional** tumbuh sebesar **15,44%**, jauh melampaui target pertumbuhan **6,53%**. Pertumbuhan ini didorong oleh komoditas unggulan seperti perkebunan dan hortikultura, meskipun komoditas pangan dan peternakan masih mengalami penurunan ekspor.
9. **SDM pertanian yang mengalami peningkatan kapasitas** tercatat sebesar **97,50%**, melebihi target **90%**. Keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang menjangkau pelaku pertanian secara luas.
10. **Kelembagaan petani yang telah menerapkan teknologi** mencapai **22,06%**, sedikit melampaui target **22%**. Pencapaian ini diperoleh melalui penguatan kegiatan pengawalan dan pendampingan, khususnya melalui program korporatisasi petani yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan Pertanian.

Berdasarkan informasi alokasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa **Kementerian Pertanian (Kementan) mampu menjaga kinerja yang cukup solid meskipun menghadapi tekanan efisiensi anggaran**. Penurunan drastis pagu tahun 2026 menjadi Rp13,76 triliun (hanya 46,8% dari alokasi 2025) sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres No. 1/2025. Meskipun demikian, sebagian besar indikator kinerja strategis—seperti peningkatan ketersediaan pangan, keamanan pangan hewani, pengendalian OPT dan penyakit hewan, serta ekspor produk pertanian—berhasil melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa **alokasi anggaran yang fokus pada program utama, terutama "Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas", mampu menghasilkan output yang relevan dan berdampak nyata**, apalagi program ini secara konsisten mendapatkan porsi anggaran terbesar.

Namun demikian, terdapat beberapa **catatan penting**. Salah satunya adalah masih rendahnya capaian prasarana pertanian, yang kemungkinan besar terdampak oleh *refocusing* anggaran dan perubahan kebijakan. Selain itu, realisasi tinggi tidak selalu menjangkau semua program secara merata, seperti program pendidikan vokasi dan peningkatan daya saing industri pertanian yang hanya memperoleh porsi kecil dari anggaran.

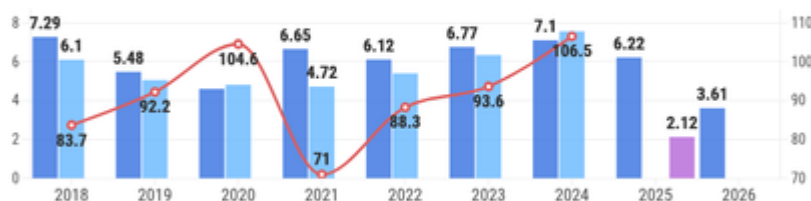
Adapun penggunaan **indeks komposit dalam pengukuran kinerja Kementan**, seperti pada indikator ketersediaan pangan strategis, memiliki dua sisi. Di satu sisi, **indeks ini membantu menyederhanakan pengukuran dan menciptakan indikator makro yang komunikatif**. Namun di sisi lain, **penggabungan berbagai komoditas ke dalam satu skor dapat menyembunyikan kegagalan atau kemunduran pada subsektor tertentu**, seperti kedelai atau peternakan, yang justru memerlukan perhatian khusus. Hal ini berisiko menurunkan presisi dalam penentuan arah kebijakan dan pengalokasian sumber daya.

**Refleksi ke depan:** Kementan perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang lebih terdistribusi dan komponen-spesifik, agar capaian program dapat diukur secara adil dan mendalam. Optimalisasi belanja tetap harus diarahkan pada program teknis yang terbukti produktif, namun juga memperkuat sistem pendukung seperti riset, pelatihan vokasi, dan kelembagaan petani, guna menjamin keberlanjutan dan daya saing sektor pertanian jangka panjang.

## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ % Realisasi ■ Anggaran ■ Realisasi ■ Efisiensi



\*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

## PAGU INDIKATIF 2026

Rp3.606,80 miliar

## APBN 2025

Rp6.220,56 miliar

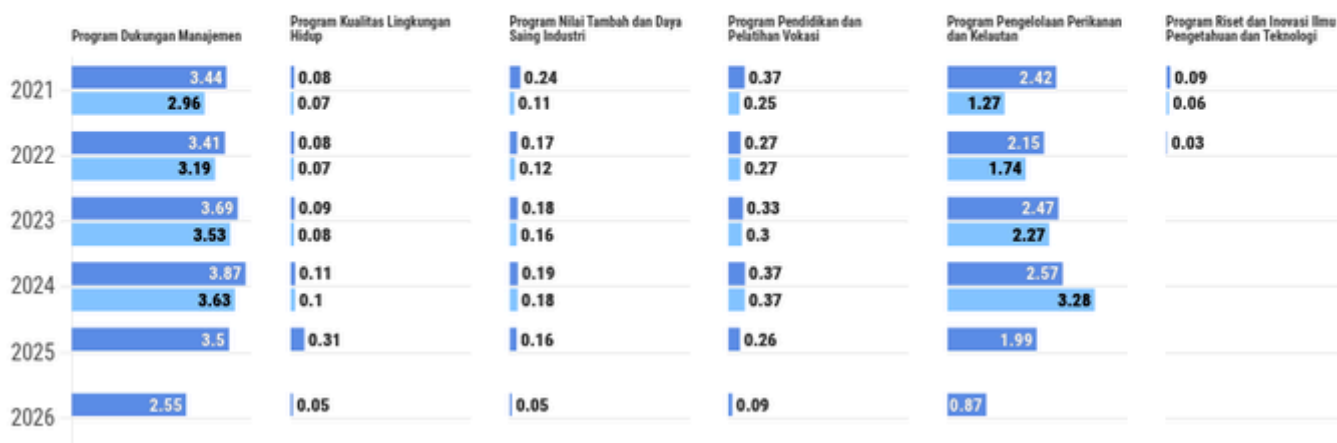
## EFISIENSI APBN 2025

Rp2.120,36 miliar

## Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

■ Budget ■ Realisasi



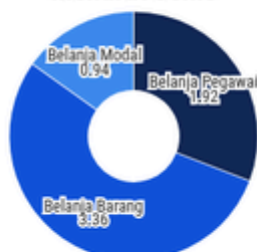
## Profil Alokasi APBN 2025

dalam triliun Rp

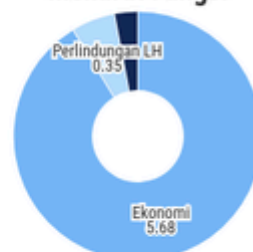
### Menurut Program



### Menurut Jenis



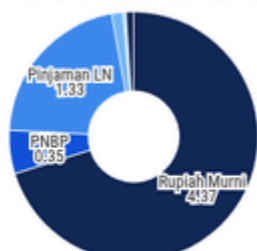
### Menurut Fungsi



### Menurut Unit Eselon I



### Menurut Sumber Dana





# Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024

■ Capaian 2024 ■ Target 2024 ■ Target 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian vs Target	Tren Capaian
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101.76 108	
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102.07 105	
	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	104.94 104.75	
	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	129.62 101.75	
Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	56.7 80 80	
	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	29.9 29.3	
Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%)	5 6	
	Nilai ekspor hasil perikanan (miliar USD)	5.95 7.2 6.25	
	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58.91 59	
Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	75.35 72 75	
Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11 11	
	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21 21	
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan (juta ton)	24.57 30.85 24.58	
	Produksi garam (juta ton)	2.04 2	
	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	95.25 70 70	
	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan (triliun Rp)	8.28 10.73	
Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	Persentase pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	98.57 98	

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2024

## Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- Tahun 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp3.606,8 miliar (58,0% dari alokasi 2025, Rp6.220,6 miliar). Penurunan alokasi ini didorong oleh upaya efisiensi yang dijalankan atas amanat Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas (dengan pengurangan hingga 50%). Tahun 2025, nilai belanja yang dilakukan efisiensi oleh KKP mencapai anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp2.120,4 miliar (hanya 34,1% dari anggaran 2025).
- Menurut jenisnya, belanja KKP dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan distribusi rata-rata 29,2% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja barang 58,0%; dan belanja modal 12,8%.
- Menurut fungsinya, belanja KKP tahun 2025 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp5.676,9 miliar (91,3%). Selain itu KKP juga menjalankan fungsi lainnya yaitu, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp354,9 miliar (5,7%) dan fungsi pendidikan Rp188,8 miliar (3%).
- Distribusi belanja KKP sangat terkonsentrasi pada dua program utama:
  - **Dukungan Manajemen** (sekitar 50%–60% dari total anggaran tahunan), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal.
  - **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**, sebagai *core business* KKP, mendominasi sisanya, terutama pasca 2023.

Sementara itu, **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Nilai Tambah Industri, dan Program Riset** mendapat alokasi sangat kecil dan cenderung stagnan—menunjukkan bahwa **fungsi pengembangan SDM dan inovasi masih belum menjadi prioritas utama** dalam struktur anggaran KKP.

- **Program Dukungan Manajemen** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar (sekitar Rp3,4–3,9 triliun per tahun hingga 2025). Tingkat realisasi cukup tinggi dan stabil, berkisar 85%–95% tiap tahun.
- **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** mengalami **lonjakan realisasi pada 2024**, mencapai Rp3,28 triliun dari pagu Rp2,57 triliun—menunjukkan realokasi anggaran atau penguatan fungsi utama KKP.
- Program-program lainnya menunjukkan **realisasi yang rendah secara konsisten**, terutama: **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**, realisasi hanya 50% atau kurang dari pagu. **Program Kualitas Lingkungan Hidup**, sangat kecil baik dari segi alokasi maupun realisasi ( $\leq$  Rp0,1 triliun).
- Tahun 2026 (berdasarkan pagu indikatif awal), **Program Dukungan Manajemen** turun drastis menjadi Rp2,55 triliun, **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** juga turun ke Rp0,87 triliun
- **Program lain seperti kualitas lingkungan hidup, nilai tambah dan daya saing industri, Pendidikan dan vokasi** hanya mendapat alokasi  $<$  Rp0,1 triliun. Hal ini disebabkan diberlakukannya efisiensi anggaran yang juga mewarnai penentuan alokasi anggaran 2026.
- Dengan tren realisasi dan distribusi anggaran tersebut, kinerja KKP menunjukkan prestasi sebagai berikut:
  - **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** pada tahun 2024 mencapai **101,76**, masih **belum memenuhi target** yang ditetapkan sebesar **108**, sehingga menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan nelayan masih perlu ditingkatkan.

- **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)** tercatat sebesar **102,07** pada tahun 2024, yang juga **belum mencapai target** tahunan sebesar **105**, menandakan bahwa kondisi ekonomi pembudidaya ikan masih belum optimal.
- **Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)** mencapai **104,94**, **melampaui target** tahun **2024** yang sebesar **104,75**, yang menunjukkan bahwa sektor pengolahan hasil perikanan mengalami **kinerja yang sangat baik** dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di bidang ini.
- **Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)** mencatat capaian tertinggi sebesar **129,62**, **jauh melampaui target** tahun 2024 sebesar **101,75**, yang mencerminkan **peningkatan signifikan kesejahteraan petambak garam**, dan menjadi indikator dengan kinerja paling menonjol.
- **Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman** pada tahun 2024 hanya mencapai **56,7%**, **jauh di bawah target** sebesar **80%**, yang mengindikasikan **masih tingginya tekanan terhadap sumber daya ikan** dan lemahnya implementasi tata kelola perikanan berkelanjutan untuk mencegah overfishing.
- **Konsumsi ikan per kapita** pada tahun 2024 tercatat sebesar **58,91 kg/kapita/tahun**, **hampir mencapai target** 59 kg namun menunjukkan tren yang **stagnan**, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk **edukasi masyarakat dan promosi konsumsi ikan lokal**, terutama di wilayah dengan konsumsi rendah.
- **Luas kawasan konservasi perairan** telah mencapai **29,9 juta hektare**, **melewati target** tahun 2024 sebesar 29,3 juta hektare. Namun, pertumbuhannya relatif lambat dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan perlunya **percepatan dalam penambahan dan pengelolaan kawasan konservasi laut** yang efektif.
- **Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan** pada 2024 hanya sebesar **0,68%**, **jauh di bawah target** 5% (2024) maupun 6% (2025). Hal ini menunjukkan **kinerja ekonomi sektor perikanan yang melemah**, dan perlunya **peningkatan produktivitas, inovasi budidaya, serta diversifikasi pasar**.
- **Nilai ekspor hasil perikanan** tahun 2024 mencapai **5,95 miliar USD**, masih **di bawah target** sebesar **7,2 miliar USD**, yang mencerminkan **perlunya strategi ekspor yang lebih agresif**, peningkatan kualitas produk, dan penetrasi pasar global yang lebih luas.
- **Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)** yang melaksanakan penangkapan ikan terukur telah mencapai **11 wilayah**, **sesuai dengan target 2024**, menandakan bahwa kebijakan penangkapan terukur mulai diterapkan secara penuh, namun perlu evaluasi keberlanjutan dan kualitas implementasinya.
- **Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir** telah mencapai **21 kawasan**, yang berarti **seluruh target tahun 2024 berhasil tercapai**. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan hasil penataan tersebut ke dalam pelaksanaan program lintas sektor secara konkret.
- **Dana yang disalurkan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan** pada tahun 2024 baru mencapai **Rp8,28 triliun**, masih **jauh di bawah target** sebesar **Rp10,73 triliun**, yang menunjukkan adanya kemungkinan kendala dalam **mekanisme penyaluran, kesiapan pelaku usaha dalam mengakses bantuan, atau keterbatasan kapasitas pelaksana program**. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan tata kelola penyaluran dana.

Struktur anggaran KKP masih berfokus pada dukungan manajemen (60%), sementara program kesejahteraan, konservasi, pendidikan, dan riset menerima alokasi minim. Kinerja ekonomi sektor kelautan tetap lemah meski anggaran besar, menunjukkan pelaksanaan program yang belum efektif. Penurunan pagu indikatif 2026 sebesar 58% menuntut restrukturisasi program dan prioritas intervensi berbasis hasil untuk menjaga kinerja dengan sumber daya terbatas.

# OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 KEMENTERIAN KEHUTANAN\*)

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**6.039,2**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**4.933,3**

APBN 2025  
(miliar Rp)

**5.185,5**

Outlook 2025  
(miliar Rp)

**5.375,9**

LKPP 2024  
(miliar Rp)

**7.818,2**

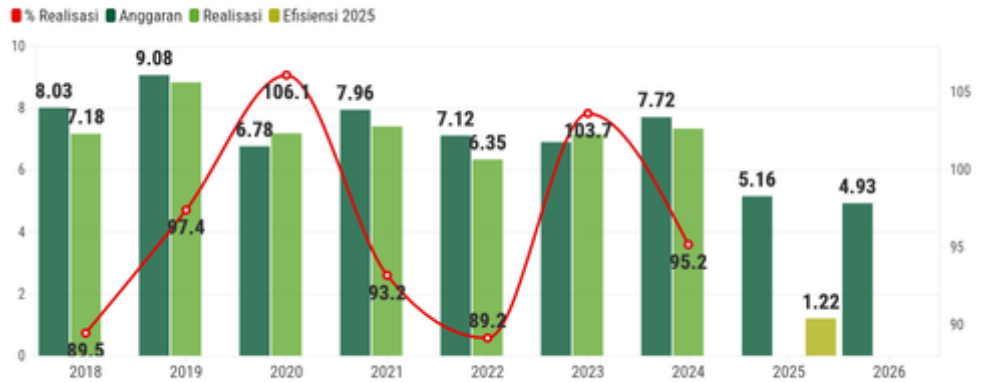
## Belanja Per Program

dalam triliun Rp



## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp



\*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

## Profil Alokasi APBN 2025

dalam triliun Rp



### Menurut Jenis



### Menurut Fungsi



### Menurut Unit Eselon I



## Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

■ Budget ■ Realisasi



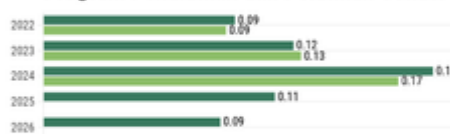
### Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim



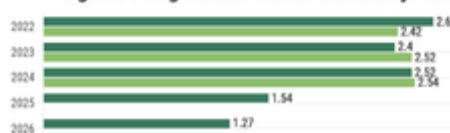
### Program Kualitas Lingkungan Hidup



### Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



### Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan



## Reliabilitas Anggaran

Artinya anggaran pemerintah bersifat realistis dan diimplementasikan sesuai rencana.

Ukurannya berupa perbandingan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan anggaran awal yang telah disetujui (PEFA Framework)

### P1-1. Aggregate Expenditure Outturn

- Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi belanja agregat mendekati jumlah yang disetujui dalam anggaran awal.
- Skor "A" diberikan jika realisasi belanja berada dalam rentang 95%-105% dari anggaran yang disetujui di dua dari tiga tahun terakhir.

2022 skor C **89.2%**

2023 skor A **103.7%**

2024 skor A **101.0%**

Skor PEFA P1-1  
Kemenhut

**A**

### P1-2.1 Expenditure Composition Outturn

- Indikator ini mengevaluasi perubahan alokasi antara kategori anggaran utama selama pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap komposisi belanja.
- Skor "A" diberikan jika varian komposisi belanja kurang dari 5% di dua dari tiga tahun terakhir.

2021 skor A **4.3%**

2022 skor A **2.1%**

2023 skor B **8.1%**

Skor PEFA P1-2.1  
Kemenhut

**A**

\*) Kemenhut merupakan pecahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemisahan ini dimulai di akhir 2024 saat dimulainya pemerintahan Prabowo-Gibran.



## Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Kehutanan 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- **Kementerian Kehutanan (Kemenhut)** merupakan salah satu lembaga hasil pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemisahan ini dimulai sejak dimulainya pemerintahan Prabowo-Gibran di 2025 lalu. **Kemenhut** bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Perannya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan, termasuk konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta penguatan industri hasil hutan. Selain itu, kementerian ini juga melakukan supervisi teknis, koordinasi internal, pengelolaan aset, pengawasan, penyuluhan, pengembangan SDM, dan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Presiden.
  - Tahun 2026, Kemenhut memperoleh pagu dalam RAPBN sebesar Rp6.039,2 miliar (122,4% dari alokasi pagu indikatif 2026, Rp4.933,3 miliar). Peningkatan alokasi ini didorong oleh prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dimana pemerintah mendukung pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan beberapa intervensi kebijakan di antaranya (i) peningkatan produktivitas kehutanan; (ii) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (iii) penguatan pengelolaan hutan secara lestari; (iv) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (v) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (vi) perlindungan dan pengamanan hutan. Ini menuntut belanja yang sifatnya modal sekaligus operasional: rehabilitasi ekosistem, perlindungan/penjagaan hutan, perbaikan mutu gambut.
  - Menurut jenisnya, belanja Kemenhut dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan porsi 43,7% dari total anggaran 2025; belanja barang 55,2%; dan belanja modal 1,1%.
  - Menurut fungsinya, belanja Kemenhut tahun 2025 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp4.158,74 miliar (80,6%). Selain itu, Kemenhut juga menjalankan fungsi lainnya yaitu, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp923,77 miliar (17,9%) dan fungsi pendidikan Rp76 miliar (1,5%).
  - Distribusi belanja Kemenhut sangat terkonsentrasi pada dua program utama:
    - **Dukungan Manajemen** (sekitar 68% dari total anggaran tahunan), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal.
    - **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**, sebagai *core business* Kemenhut, memperoleh alokasi sekitar 29,8% dari total anggaran 2025 sebelum efisiensi.
- Terdapat satu lagi program yang dijalankan Kemenhut, **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, yang hanya mendapat alokasi 2,2% dari alokasi anggaran 2025.
- Tahun 2026, **Program Dukungan Manajemen** memperoleh kenaikan alokasi menjadi Rp4.203,2 miliar dari Rp3.507,9 miliar di 2025, **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** justru mengalami peningkatan mencapai Rp1.723,7 dari Rp1.537,68 di 2025.
  - Dalam menjalankan programnya, berdasarkan penilaian reliabilitas anggaran yang merupakan salah satu komponen PEFA Framework dari World Bank. PEFA menilai apakah anggaran pemerintah realistis dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud—diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran awal (baik secara agregat (PI-1) maupun komposisinya (PI-2)). Untuk PI-1 (Aggregate Expenditure Outturn), ambang penilaian utamanya: A: 95–105%, B: 90–110%, C: 85–115% dari anggaran awal, dilihat pada “dua dari tiga” tahun terakhir. Jika anggaran Kemenhut (dengan menggabungkan histori dari KLHK) dibandingkan nilai realisasi dan anggarannya, dua dari tiga tahun (2023 & 2024) berada **dalam rentang 95–105%**, sehingga total **skor A**. Artinya, **akurasinya tinggi secara agregat**—meski 2022 sempat kurang serap, dua tahun terakhir realisasi sudah sangat dekat dengan pagu awal.



- Untuk perbandingan realisasi dan anggaran secara komposisi, PI-2.1 (Expenditure Composition Outturn), Kemenhut memiliki riwayat dimana dua dari tiga tahun **varian komposisi <5%**, maka **skor A**. Ini menunjukkan **pergeseran antar-program selama tahun berjalan relatif kecil/terkendali**; artinya prioritas yang ditetapkan di awal tahun umumnya **tetap konsisten** saat eksekusi.
- Dengan distribusi anggaran tersebut, kinerja Kemenhut dimulai dengan *baseline* 2024 sebagai berikut:
  - Luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023 mencapai 125.664.549,85 ha, luasan tersebut jika dibagi menurut fungsinya terdiri atas:
    1. Kawasan konservasi perairan mencapai 5.321.321 ha
    2. Kawasan konservasi darat mencapai 22.090.903,76 ha
    3. Hutan lindung mencapai 29.520.962,98 ha
    4. Hutan produksi terbatas mencapai 26.798.799,89 ha
    5. Hutan produksi mencapai 29.171.184,19 ha
    6. Hutan produksi yang Dapat Dikonversi mencapai 12.761.378,03 ha.
 Di tahun 2024, luas kawasan hutan daratan dan perairan mencapai 125.541.298,80 ha.
  - Penurunan laju deforestasi berhasil ditekan hingga mencapai 0,2 juta hektare per tahun, lebih rendah dari target sebesar 0,31 juta hektare, yang mencerminkan efektivitas pengendalian konversi hutan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga tutupan hutan di tengah tekanan ekspansi lahan, dan target 2025 yang tetap sebesar 0,2 juta ha mengindikasikan pendekatan yang realistis untuk mempertahankan capaian tersebut.
  - Produksi kayu bulat mencapai 60 juta meter kubik, melampaui target sebesar 57,4 juta m<sup>3</sup>, menunjukkan bahwa produktivitas hutan produksi cukup tinggi dan stabil. Target 2025 tidak berubah, menandakan bahwa capaian saat ini dianggap sebagai batas produksi berkelanjutan yang masih memperhatikan prinsip kelestarian.
  - Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) melonjak hingga 3.573 ribu ton, jauh melampaui target 2.500 ribu ton, menandakan bahwa subsektor HHBK berkontribusi signifikan dan menjadi potensi unggulan kehutanan. Namun, penurunan target 2025 ke 2.000 ribu ton terlihat tidak selaras dengan tren capaian positif, sehingga perencanaan target perlu ditinjau ulang agar lebih mencerminkan potensi sektor ini.
  - Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting* tercapai sebesar 16 miliar USD, sesuai target, namun tidak menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan stagnasi ekspor kehutanan, kemungkinan dipengaruhi kondisi pasar global. Target 2025 yang tetap menunjukkan pendekatan konservatif dan perlunya strategi baru untuk memperluas pasar.
  - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kehutanan mencapai Rp7,5 triliun, melebihi target Rp7,06 triliun, menunjukkan peningkatan kontribusi fiskal sektor kehutanan. Target 2025 hanya sedikit dinaikkan menjadi Rp7,48 triliun, memberi ruang pertumbuhan namun tetap berhati-hati terhadap fluktuasi produksi dan pasar.
  - Luas kawasan hutan yang dilepas untuk program TORA mencapai 3,1 juta hektare, sedikit melampaui target 3 juta hektare, yang menandakan komitmen terhadap agenda reforma agraria berjalan sesuai rencana. Target 2025 dipertahankan pada angka yang sama, mengindikasikan kelanjutan kebijakan redistribusi lahan.
  - Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat tercapai sebesar 7,1 juta hektare, melebihi target 6,69 juta hektare, menandakan bahwa program perhutanan sosial menunjukkan penguatan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Target 2025 dinaikkan ke 7,11 juta hektare, sejalan dengan tren positif tersebut.
  - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tercatat sebesar 18.025 hektare, melebihi target 17.500 hektare, namun menunjukkan tren perlambatan dari tahun sebelumnya. Target 2025 justru diturunkan

secara signifikan ke 3.800 hektare, kemungkinan mencerminkan refokus strategi, keterbatasan anggaran, atau perubahan pendekatan rehabilitasi.

- Luas kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan pada 2024 mencapai 1.137,98 ribu hektare, lebih rendah dari target 1.196 ribu hektare. Dalam konteks ini, penurunan merupakan hal positif karena menunjukkan pengurangan kejadian kebakaran atau peningkatan efektivitas pencegahan. Target 2025 ditetapkan jauh lebih rendah (196 ribu ha), yang menandakan peningkatan ekspektasi terhadap kontrol dini dan sistem peringatan dini kebakaran.
- Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional mencapai Rp145,1 triliun, melebihi target Rp137,2 triliun, mencerminkan bahwa sektor kehutanan masih memiliki kekuatan ekonomi signifikan. Peningkatan target 2025 menjadi Rp162,1 triliun menunjukkan adanya optimisme terhadap ekspansi sektor ini, termasuk potensi kontribusi dari ekowisata, jasa lingkungan, dan hasil hutan bernilai tambah.
- Tren kinerja secara umum meningkat dan stabil sejak 2023 → menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pelaksanaan program dan koordinasi sektor kehutanan. Sebagian besar capaian KLHK 2024 melampaui target menunjukkan bahwa banyak target terlalu konservatif. Ini bisa berarti baseline belum memperhitungkan kapasitas aktual atau potensi sektor kehutanan.
- Beberapa target 2025 malah diturunkan, meski capaian 2024 sangat baik (misalnya HHBK dan rehabilitasi lahan), yang menimbulkan pertanyaan konsistensi antara capaian, potensi, dan perencanaan ke depan.

RAPBN 2026 **Rp6,039 triliun** ( $\approx +22,4\%$  di atas pagu indikatif) masuk akal karena RKP 2026 menekankan **pengelolaan hutan lestari**: produktivitas, agroforestri/bioekonomi, perlindungan–pengamanan, fungsi sosial, dan prakondisi (KPH, data, kelembagaan). Namun, **profil 2025** yang didominasi **belanja barang (55,2%) + pegawai (43,7%)** dan **belanja modal sangat kecil (1,1%)** berpotensi **tidak cukup** untuk agenda yang butuh infrastruktur lapangan (persemaian, sarpras KPH/MRV, rekayasa hidrologi gambut, peralatan karhutla, pos pengamanan). Untuk 2026, logis bila **capex naik signifikan**, diikuti **BMKTM** ke kelompok perhutanan sosial, sementara porsi **Dukungan Manajemen** ( $\pm 68\%$  di 2025) **perlahan diturunkan** agar **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** menyerap porsi lebih besar dan langsung “mengunci” output.

Rekam jejak **PI-1 (Aggregate Outturn) = A** dan **PI-2.1 (Composition Outturn) = A** menunjukkan **kredibilitas eksekusi tinggi**: realisasi mendekati pagu dan pergeseran antar-program relatif kecil. Ini aset penting saat pagu 2026 naik—menandakan **kapasitas pelaksanaan membaik** (khususnya 2023–2024). Artinya, **tambahan alokasi 2026 berpotensi terserap** asalkan proyek fisik **siap tender sejak awal tahun** (DED, lahan/izin, paket multi-year jelas) dan kalender pengadaan–kas **mengikat** unit pelaksana. Skor komposisi yang baik juga memberi ruang untuk **menjaga prioritas** (perlindungan hutan, agroforestri, rehabilitasi) tanpa banyak virement di tengah tahun.

Supaya belanja tahun 2026 efektif, anggaran harus terkait langsung dengan indikator hasil utama: deforestasi, rehabilitasi/restorasi gambut, kinerja perhutanan sosial, produktivitas hutan produksi, penegakan karhutla, serta PNPB dan ekspor hasil hutan bernilai tambah. Belanja harus dialihkan ke belanja modal & Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat (BMKTM) yang berdampak nyata di lapangan, kontrak kerja KPH/Polhut/Manggala Agni berbasis indikator, dan capaian dipantau lewat MRV serta data satelit. Rupiah pendamping PHLN juga disiapkan sejak awal agar kinerja lebih terlihat.

# OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 KEMENTERIAN PERTANIAN

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**40.000,0**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**13.757,1**

APBN 2025  
(miliar Rp)

**29.374,0**

Outlook 2025  
(miliar Rp)

**27.300,9**

LKPP 2024  
(miliar Rp)

**14.305,7**

## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

dalam triliun Rp

■ % Realisasi ■ Anggaran ■ Realisasi ■ Efisiensi 2025 ■ Pagu Indikatif 2026

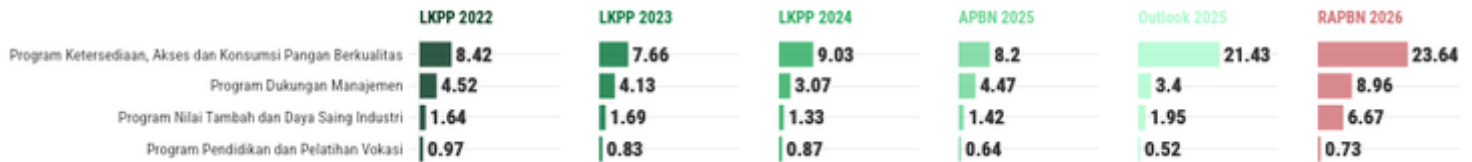


\*) Angka realisasi 2024 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

## Belanja Per Program

dalam triliun Rp



## Profil Alokasi APBN 2025

dalam triliun Rp

Menurut Program



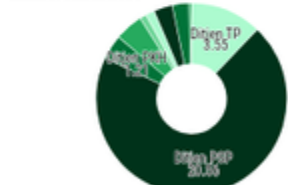
Menurut Jenis



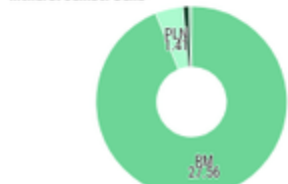
Menurut Fungsi



Menurut Unit Eselon I



Menurut Sumber Dana



## Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

■ Budget ■ Realisasi



## Reliabilitas Anggaran

Artinya anggaran pemerintah bersifat realistis dan diimplementasikan sesuai rencana.

Ukurannya berupa perbandingan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan anggaran awal yang telah disetujui (PEFA Framework)

### P1-1. Aggregate Expenditure Outturn

- Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi belanja agregat mendekati jumlah yang disetujui dalam anggaran awal.
- Skor "A" diberikan jika realisasi belanja berada dalam rentang 95%-105% dari anggaran yang disetujui di dua dari tiga tahun terakhir.

**2022 skor B 108.3%**

**2023 skor A 93.5%**

**2024 skor B 97.1%**

**Skor PEFA P1-1  
Kementan**

**B**

### P1-2.1 Expenditure Composition Outturn

- Indikator ini mengevaluasi perubahan alokasi antara kategori anggaran utama selama pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap komposisi belanja.
- Skor "A" diberikan jika varian komposisi belanja kurang dari 5% di dua dari tiga tahun terakhir.

**2022 skor D 15.4%**

**2023 skor A 3%**

**2024 skor D 18.4%**

**Skor PEFA P1-2.1  
Kementan**

**D**

## Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Pertanian 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- Tahun 2026, Kementerian Pertanian memperoleh pagu anggaran dalam RAPBN sebesar **Rp40.000,0 miliar** (290,7% dari alokasi pagu indikatif 2026, Rp13.757,1 miliar. Pagu yang melonjak tinggi ini selaras dengan tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan dan Energi”. Pemerintah menekankan swasembada pangan lewat pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan, penguatan tata-kelola sistem pangan, serta intervensi hulu–hilir (benih, pupuk, alsintan, irigasi, hingga cadangan dan fortifikasi).
- Menurut jenisnya, belanja Kementerian Pertanian dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja barang dengan distribusi rata-rata 83,54% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja pegawai 12,96%; dan belanja modal 3,5%.
- Menurut fungsinya, belanja Kementerian Pertanian tahun 2025 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp28,99 miliar (98,7 %) sisanya fungsi pendidikan Rp374,97 juta (1,3%).
- Distribusi belanja Kementerian Pertanian terkonsentrasi pada dua program yaitu:
  - **Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** (rata-rata 61,48% dari total anggaran tahunan)
  - **Dukungan Manajemen** (rata-rata 24,93% dari total anggaran tahunan)

Sementara itu, **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** mendapat alokasi yang cukup kecil yakni di bawah 10%. Adapun Program Riset dan teknologi tidak lagi dianggarkan sejak tahun 2023 karena berpindahnya fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- **Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** selalu mendapat bagian anggaran terbesar, dengan rata-rata realisasi 93,22% pada 2021–2023. Pada 2025, alokasi di Kementerian Pertanian melonjak hingga 99% lebih tinggi dari 2024, menjadikan program ini memperoleh Rp23,215 miliar (79,04% dari anggaran). Peningkatan ini mendukung kebijakan strategis seperti peningkatan produktivitas, pengembangan sentra pangan, pangan lokal, data pangan, keterlusuran, dan biosecurity—menunjukkan fokus utama kementerian.
- **Program Dukungan Manajemen** menunjukkan tren penurunan jumlah anggaran dari tahun 2021 hingga 2025 dengan realisasi rata-rata tahun 2021–2023 sebesar 89,56%.
- **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** mendapat alokasi anggaran rata-rata sekitar 9% dari total anggaran tahunan dengan rata-rata realisasi tahun 2021–2023 sebesar 87,37%
- **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** mendapat alokasi anggaran yang paling kecil yaitu rata-rata 3,42% dari anggaran tahunan hingga tahun 2025 dengan rata-rata realisasi tahun 2021–2023 sebesar 110,04%.
- Tahun 2026, Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas memperoleh alokasi pagu RAPBN sebesar Rp 23.636,6 miliar; Program Dukungan Manajemen sebesar Rp8.958,8 miliar, dan program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp6.674,6 miliar.
- Dalam menjalankan programnya, berdasarkan penilaian reliabilitas anggaran yang merupakan salah satu komponen PEFA Framework dari World Bank. PEFA menilai apakah anggaran pemerintah realistis dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud—diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran awal (baik secara agregat (PI-1) maupun komposisinya (PI-2)). Untuk PI-1 (*Aggregate Expenditure Outturn*), ambang penilaian utamanya: A: 95–105%, B: 90–110%, C: 85–115% dari anggaran awal, dilihat pada “dua dari tiga” tahun terakhir. Secara keseluruhan, kinerja **PI-1** Kementerian Pertanian mendapat **skor B**. Pada 2022 realisasi mencapai **108,3%** dari anggaran awal (kelebihan belanja **+8,3%**,



rentang B), pada 2023 **93,5%** (kekurangan **-6,5%**, rentang B), dan pada 2024 **97,1%** (kekurangan **-2,9%**, rentang A). Karena **dua dari tiga tahun** berada dalam rentang **90–110%**, penilaian agregatnya **cukup kredibel**; deviasi ada tetapi **terkendali**, dengan perbaikan nyata pada 2024. Menyongsong **lonjakan pagu 2026**, kedekatan total ini merupakan modal awal, namun diperlukan **peningkatan kesiapan proyek** dan **kalender pengadaan yang disiplin** agar penyimpangan realisasi tidak kembali melebar.

- Untuk **PI-2.1**, Kementerian Pertanian memperoleh **skor keseluruhan D**. Pada 2022 varian komposisi belanja mencapai **15,4%** (D), pada 2023 turun menjadi **3,0%** (A), namun pada 2024 kembali melebar menjadi **18,4%** (D). Karena hanya satu tahun yang berada di bawah ambang **<5%**, sementara dua tahun lainnya **>15%**, struktur belanja **sering bergeser jauh dari rencana awal**—mengindikasikan realokasi (virement) besar antar-program atau antar-jenis belanja di tengah tahun. Ke depan, komposisi ini perlu perhatian utama: tetapkan sejak awal **porsi belanja hulu–hilir** (input, benih dan pupuk, alat dan mesin pertanian, kesehatan hewan, cadangan/fortifikasi, serta KSPP), **batasi pergeseran** melalui **pagu yang lebih terikat, kontrak berbasis output, dan sistem peringatan dini** atas serapan per program agar perubahan di tengah tahun tetap minimal dan terkendali.
- Dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, RKP 2026 menetapkan target capaian yang menjadi amanat bagi Kementan. Arah kebijakan swasembada pangan sendiri akan dilaksanakan melalui: (i) pengembangan KSPP/lumbung pangan; (ii) penguatan cadangan pangan; (iii) pengembangan pangan hewani; (iv) pengembangan pangan akuatik (*bluefood*); (v) pengembangan pangan lokal dan nabati; (vi) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (vii) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia (SDM), riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; serta (viii) penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi. Kebijakan tersebut dijalankan dengan sasaran sebagai berikut:
  - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP (PN 2).  
Target 2026 menambah produksi padi per lokasi KSPP—±845 ribu ton (Kalimantan Tengah), ±444 ribu ton (Sumatera Selatan), dan ±964 ribu ton (Papua Selatan). Cara mencapainya: optimalisasi spasial dan pemulihan/operasi–pemeliharaan jaringan irigasi (mandat Inpres 2/2025), penguatan on-farm (benih spesifik lokasi, pupuk, pembenah tanah, alat-mesin pertanian) serta peningkatan off-farm seperti akses internet, pendampingan petani, dan penguatan kapasitas di kawasan transmigrasi.
  - Meningkatnya produksi bahan pangan hewani serta keamanan dan mutu pakan (PN 2).  
Target 2026: daging 5,10 juta ton, telur 7,75 juta ton, dan susu 866 ribu ton. Intervensinya mencakup penguatan perbibitan dan genetic gain, ketersediaan dan kualitas pakan, perbaikan manajemen kesehatan hewan (vaksinasi, surveilans, biosekuriti), serta peningkatan pascapanen dan hilirisasi produk hewani yang memenuhi standar sertifikasi dan pemeriksaan.
  - Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati (PN 2).  
Target 2026: padi 54,85 juta ton dan jagung 22,51 juta ton. Upayanya berfokus pada ketersediaan input bermutu, dukungan irigasi terutama di sentra lumbung pangan, pendampingan on-farm spesifik agro-ekosistem, penguatan pascapanen untuk menekan susut hasil, serta penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui kelembagaan petani (KTH/KUPS) dan kemitraan usaha.
  - Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi (PN 2).  
Target 2026: 40% beras terfortifikasi dalam program bantuan pangan. Pemerintah memfasilitasi produksi dan distribusi beras fortifikasi, memperkuat pemeriksaan sarana produksi melalui unit pelaksana teknis, menegakkan standarisasi dan pengendalian mutu, serta menyinergikan tata niaga dengan BULOG dan pemda agar pasokan dan kualitas terjaga hingga konsumen.



## Target Kinerja Kementerian Pertanian 2026

■ Capaian 2024 ■ Outlook 2025 ■ Target 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian vs Target	Intervensi Kunci
Meningkatnya Produksi dan Luas Panen Padi di KSPP - Prioritas Nasional (PN) 2	Produksi Beras KSPP Kalimantan Tengah (ribu ton)	844.984	(i) optimalisasi geospasial seperti melalui pengembangan infrastruktur pertanian seperti jalan dan jembatan, rehabilitasi dan OP jaringan irigasi rawa serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan; (ii) penguatan on farm melalui dukungan pupuk, benih spesifik lokasi, serta peningkatan input pembenah tanah; dan (iii) penguatan off farm terutama peningkatan akses internet dan kapasitas petani.
	Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (ribu ton)	443.783	(i) optimalisasi geospasial melalui pengembangan jaringan irigasi Lematang dan Komerling, pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, serta preservasi ruas jalan; (ii) penguatan on farm melalui dukungan input pertanian pasca optimasi lahan; dan (iii) penguatan off farm melalui pengembangan kawasan transmigrasi.
	Produksi Beras KSPP Papua Selatan (ribu ton)	964	(i) optimalisasi geospasial seperti melalui rehabilitasi dan OP jaringan irigasi rawa serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025; (ii) penguatan on farm melalui dukungan input dan alat mesin pertanian; dan (iii) penguatan off farm melalui pengembangan kawasan transmigrasi dan pelatihan kepada petani.
Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Hewani serta Meningkatkan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan - PN 2	Produksi Daging (juta ton)	4.9 4.96 5.1	(i) peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan terutama bantuan ternak unggul; (ii) perluasan penerapan praktik peternakan modern terutama layanan optimalisasi reproduksi; (iii) penguatan pascapanen dan hilirisasi produk hasil ternak terutama sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian; serta (iv) pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan pendekatan satu kesehatan.
	Produksi Telur (juta ton)	6.89 7.43 7.75	
	Produksi Susu (ribu ton)	837.22 855.57 866.43	
Meningkatnya Produksi Pangan Lokal dan Nabati - PN 2	Produksi Padi (juta ton)	53.14 54.45 54.85	(i) peningkatan ketersediaan dan kualitas input dan pendukung pengembangan pangan lokal dan nabati terutama jaringan irigasi di sentra produksi lumbung pangan; (ii) penguatan on farm pengembangan pangan lokal dan nabati terutama alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan; (iii) penguatan off farm pengembangan pangan lokal dan nabati terutama sarana pascapanen tanaman pangan; serta (iv) peningkatan ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat terutama peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
	Produksi Jagung (juta ton)	19.19 21.48 22.51	
Meningkatnya Konsumsi Bahan Pangan Terfortifikasi/Biofortifikasi - PN 2	Persentase Beras Fortifikasi dalam Program Bantuan Pangan (%)	40	Fasilitasi produksi dan distribusi pangan terfortifikasi terutama layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengembangan kawasan padi biofortifikasi.
Ditumbuhkan dan Dikembangkannya Kelembagaan Ekonomi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta Meningkatkan Persentase Petani Muda - PN 2	Persentase Petani Muda terhadap Jumlah Petani (%)	21.93 22.03 22.13	(i) peningkatan riset dan inovasi yang adaptif dan inklusif terutama purwarupa hasil riset dan inovasi; (ii) pengembangan kapasitas SDM terutama pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan (D-IV); (iii) penguatan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan yang melibatkan para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara langsung; (iv) pengembangan satu data pangan terutama data lahan pertanian; serta (v) penerapan bantuan langsung petani terutama penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi dan diverifikasi.

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah 2026 (Bappenas, 2026)

- Ditumbuhkan dan dikembangkannya kelembagaan ekonomi petani serta meningkatnya persentase petani muda (PN 2).  
Target 2026 menaikkan persentase petani muda menjadi sekitar 22,1%. Arah kebijakannya: riset dan inovasi yang adaptif, penguatan SDM vokasi dan kewirausahaan, konsolidasi kelembagaan ekonomi petani lintas komoditas (termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam),

pengembangan data spasial–tanah untuk layanan pertanian presisi, serta penyaluran bantuan langsung yang tervalidasi bagi penerima pupuk bersubsidi.

- Lonjakan pagu Kementan 2026 didorong oleh paket kebijakan swasembada pangan berbasis **Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)** yang bersifat hulu–hilir: rehabilitasi serta operasi–pemeliharaan irigasi (sinkron Instruksi Presiden 2/2025), benih spesifik lokasi, pupuk dan pembenah tanah, pengadaan alat–mesin pertanian, layanan penyuluhan/pendampingan, serta penataan sisi **off-farm** (data pangan, keterlusuran, dan konektivitas digital). Di saat bersamaan, produksi hewani diperkuat melalui perbibitan, pakan, dan **biosekuriti** (vaksinasi dan surveilans PMK/ASF/AI/LSD) serta peningkatan pascapanen–hilirisasi. Agenda **cadangan dan mutu pangan—CBP 3,0–3,5 juta ton** dan cakupan **beras fortifikasi 40%** bantuan pangan—menuntut investasi gudang/logistik, pengujian mutu, standarisasi, dan koordinasi BULOG–Pemda–pelaku usaha. Upaya nilai tambah diarahkan pada pengolahan, pengurangan kehilangan pascapanen, dan diversifikasi produk, dengan dukungan manajemen yang tetap dijaga agar tidak menggerus alokasi lapangan.
- Risiko utama meliputi ketidaksiapan proyek terhadap lompatan pagu (potensi keterlambatan tender/kontrak alsintan dan input impor), ketidaksinkronan jadwal irigasi dengan musim tanam, serta kapasitas satker menghadapi porsi belanja barang yang historis sangat besar sementara belanja modal kecil. Ketersediaan dan penyaluran input rawan mismatch RDKK–kios dan keterlambatan distribusi, sementara guncangan biologis dan iklim (wabah dan cuaca ekstrem) dapat menekan produktivitas. Fragmentasi koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda mengancam konsistensi eksekusi, diperparah oleh kredibilitas **komposisi** anggaran yang lemah (PEFA **PI-2.1 = D**) sehingga rawan pergeseran besar di tengah tahun, serta risiko integritas pada pengadaan massal.
- Pengamanannya perlu dilakukan melalui penerapan **readiness filter** dan pra-tender (DED, spesifikasi, legalitas, paket siap akhir 2025), gunakan **e-catalog/kontrak payung** dan skema **multi-year** untuk item strategis; tetapkan kalender pengadaan–penyaluran yang mengikat dengan **front-loading** input kritis pada triwulan I–II, disertai **cut-off** dan SLA pemasok per kabupaten. Perlu pula dilakukan penetapan komposisi melalui **floor** minimal untuk belanja **on-farm** KSPP, kesehatan hewan, dan cadangan/fortifikasi; membatasi **virement** dengan **gatekeeping** internal dan **kontrak berbasis output**. Penguatan manajemen risiko biologis–iklim (dana kontinjensi vaksin/obat, **buffer** pakan, **AUTP/AUTS**, pompa/sumur darurat, dan paket **climate-smart agriculture**), serta sistem data–keterlusuran (registri petani **e-RDKK** berbasis NIK, **geo-tagging** KSPP/CBP, **dashboard** serapan–kinerja, dan audit mutu laboratorium). Kepastian **joint planning & delivery** dengan PUPR, Bapanas/BULOG, Perindustrian/Perdagangan, dan pemda; menjaga integritas lewat **whitelist** pemasok, paket kecil multi-vendor, pelibatan APIP/Itjen sejak perencanaan, dan kanal aduan publik juga diperlukan.

# OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

**13.000,0**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**3.606,8**

APBN 2025  
(miliar Rp)

**6.220,6**

Outlook 2025  
(miliar Rp)

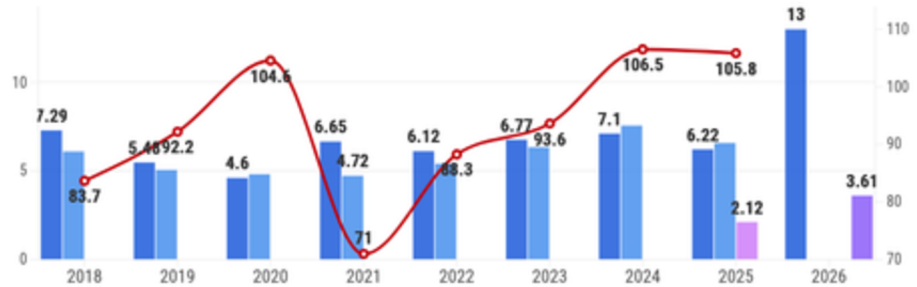
**6.583,7**

LKPP 2024  
(miliar Rp)

**6.299,9**

## Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L dalam triliun Rp

■ % Realisasi ■ Anggaran ■ Realisasi ■ Efisiensi 2025 ■ Pagu Indikatif 2026



\*) Angka realisasi 2025 merupakan angka outlook.

\*\*) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui sebagai anggaran efektif K/L. Nilai tersebut telah dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025.

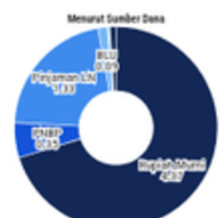
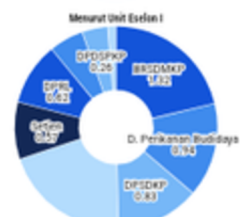
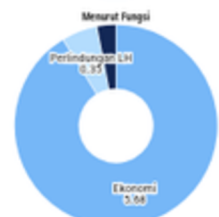
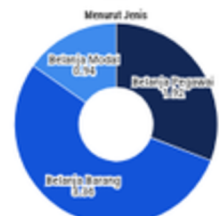
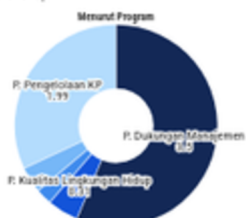
\*\*\*) Angka pagu indikatif 2026 diambil dari dokumen KEM-PPKF 2026 dan anggaran 2026 diambil dari Nota Keuangan RAPBN 2026.

## Belanja Per Program

dalam triliun Rp



Profil Alokasi APBN 2025  
dalam triliun Rp



## Anggaran vs Realisasi Per Program

dalam triliun Rp

■ Budget (miliar Rp) ■ Realisasi (miliar Rp)

### Program Dukungan Manajemen



### Program Kualitas Lingkungan Hidup



### Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri



### Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



### Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan



## Reliabilitas Anggaran

Artinya anggaran pemerintah bersifat realistis dan diimplementasikan sesuai rencana.

Ukurannya berupa perbandingan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan anggaran awal yang telah disetujui (*PEFA Framework*)

### PI-1. Aggregate Expenditure Outturn

- Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi belanja agregat mendekati jumlah yang disetujui dalam anggaran awal.
- Skor "A" diberikan jika realisasi belanja berada dalam rentang 95%-105% dari anggaran yang disetujui di dua dari tiga tahun terakhir.

**2022 skor C 88.3%**

**2023 skor B 93.6%**

**2024 skor C 88.4%**

**Skor PEFA P1.1 KKP**

**C**

### PI-2. Expenditure Composition Outturn

- Indikator ini mengevaluasi perubahan alokasi antara kategori anggaran utama selama pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap komposisi belanja.
- Skor "A" diberikan jika varian komposisi belanja kurang dari 5% di dua dari tiga tahun terakhir.

**2022 skor B 7.8%**

**2023 skor A 2.2%**

**2024 skor C 14.1%**

**Skor PEFA P1.2.1 KKP**

**B**

## Highlights Overview Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026

oleh Marihot Nasution & Yunita Romauli Nababan

- Tahun 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh indikasi pagu anggaran sebesar Rp13.000,0 miliar (naik sebesar 260,43% dari alokasi pagu indikatif 2026, Rp3.606,8 miliar). Angka pagu indikatif didorong oleh dampak efisiensi yang terjadi di awal tahun 2025. Namun seiring berjalannya waktu dan penjabaran prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, lonjakan belanja KKP diarahkan untuk a) pengembangan pangan akuatik (*blue food*); b) pengembangan ekonomi biru; c) pemberantasan IUU *fishing* & penguatan PSDKP; d) pengelolaan sampah pesisir & laut (bagian dari transformasi ekonomi hijau); dan e) hilirisasi industri berbasis SDA (termasuk olahan perikanan & garam). RKP 2026 secara eksplisit menugaskan KKP dalam menjalankan program tersebut, sehingga belanja K/L akan digunakan untuk mendukung prioritas—dengan semangat “*spending to invest*”—termasuk infrastruktur perikanan, peningkatan kapasitas produksi, pengawasan sumber daya, serta industrialisasi/ hilirisasi.
- Menurut jenisnya, belanja KKP dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan distribusi rata-rata 29,2% dari total anggaran tiap tahunnya; belanja barang 58,0%; dan belanja modal 12,8%.
- Menurut fungsinya, belanja KKP tahun 2025 didominasi oleh belanja fungsi ekonomi dengan nilai Rp5.676,9 miliar (91,3%). Selain itu KKP juga menjalankan fungsi lainnya yaitu, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp354,9 miliar (5,7%) dan fungsi pendidikan Rp188,8 miliar (3%).
- Distribusi belanja KKP sangat terkonsentrasi pada dua program utama:
  - **Dukungan Manajemen** (sekitar 50%–60% dari total anggaran tahunan), yang mencakup belanja operasional dan dukungan internal.
  - **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**, sebagai *core business* KKP, mendominasi sisanya, terutama pasca 2023.

Sementara itu, **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, **Program Nilai Tambah Industri**, dan **Program Riset** mendapat alokasi sangat kecil dan cenderung stagnan—menunjukkan bahwa **fungsi pengembangan SDM dan inovasi masih belum menjadi prioritas utama** dalam struktur anggaran KKP.

- **Program Dukungan Manajemen** secara konsisten mendapatkan alokasi terbesar (sekitar Rp3,4–3,9 triliun per tahun hingga 2026). Tingkat realisasi cukup tinggi dan stabil, berkisar 80%–98% tiap tahun.
- **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** mengalami **lonjakan realisasi pada 2024**, mencapai Rp3,28 triliun dari pagu Rp2,57 triliun—menunjukkan realokasi anggaran atau penguatan fungsi utama KKP. Di tahun 2025, diperkirakan realisasi program ini mencapai 143% dari pagunya sebesar Rp1,99 triliun atau mencapai realisasi Rp2,85 triliun.
- Program-program lainnya menunjukkan **realisasi yang rendah secara konsisten**, terutama: **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**, realisasi rata-rata tiap tahun hanya 77% atau kurang dari pagu. **Program Kualitas Lingkungan Hidup**, sangat kecil baik dari segi alokasi maupun realisasi (≤Rp0,1 triliun).
- Tahun 2026, **Program Dukungan Manajemen** dialokasikan sebesar Rp3,63 triliun, **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** dialokasikan Rp8,67 triliun, jauh lebih besar dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.
- **Program lain seperti kualitas lingkungan hidup, nilai tambah dan daya saing industri, Pendidikan dan vokasi** hanya mendapat alokasi <Rp1 triliun. Penentuan alokasi ini diwarnai adanya prioritas K/L ini dalam pembangunan ke depan.
- Dalam menjalankan programnya, berdasarkan penilaian reliabilitas anggaran yang merupakan salah satu komponen PEFA Framework dari World Bank. PEFA menilai apakah anggaran pemerintah realistis



dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud—diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran awal (baik secara agregat (PI-1) maupun komposisinya (PI-2)). Untuk PI-1 (*Aggregate Expenditure Outturn*), ambang penilaian utamanya: A: 95–105%, B: 90–110%, C: 85–115% dari anggaran awal, dilihat pada “dua dari tiga” tahun terakhir. Jika anggaran KKP dibandingkan nilai realisasi dan anggarannya secara agregat, maka hasil penilaian menunjukkan skor C. Artinya, pada 2022 dan 2024, realisasi berada di luar rentang  $\pm 10\%$  (namun masih dalam  $\pm 15\%$ ); 2023 berada dalam  $\pm 10\%$ . Karena yang berada dalam  $\pm 10\%$  tidak mencapai “dua dari tiga tahun”, maka keseluruhan jatuh ke rentang C (85–115%). Secara sederhana, **KKP cenderung under-spend ~6–12% pada dua dari tiga tahun yang dinilai**. Hal ini dapat disebabkan oleh perencanaan yang terlalu optimis untuk belanja modal sehingga terjadi keterlambatan lelang/konstruksi, belanja operasional berbasis operasi laut sangat sensitif terhadap harga/kenaikan biaya dan cuaca laut yang menyebabkan penjadwalan bergeser. Selain itu, periode 2022–2024 terdapat perubahan kebijakan/rekalkulasi program atau efisiensi yang membutuhkan adaptasi dalam pelaksanaannya.

- Untuk perbandingan realisasi dan anggaran secara komposisi, PI-2.1 (*Expenditure Composition Outturn*), KKP memperoleh skor B. Hal ini terjadi karena dua dari tiga tahun berada **<10%**, maka **skor keseluruhan B**. Artinya, meskipun total realisasi kadang meleset, **pergeseran antar-program/jenis belanja relatif terjaga** pada sebagian besar tahun (tidak “bergeser liar”), kecuali pada 2024 yang menunjukkan varian lebih tinggi (indikasi **realokasi in-year** atau ketidakseragaman serapan antar-program).
- Capaian dari program prioritas KKP ke depan yang diangkat dalam RKP 2026 antara lain ditandai dengan indikator dalam tabel berikut:

## Target Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026

■ Capaian 2024 ■ Outlook 2025 ■ Target 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian vs Target	Intervensi kunci
Pengembangan pangan akuatik (blue food) - Prioritas Nasional (PN) 2.	Produksi perikanan budidaya (juta ton)	6.37 6.75 7.15	Pengembangan input & sarpras budidaya; pengembangan kawasan/klaster komoditas & revitalisasi tambak; penguatan tata kelola budidaya.
	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	7.39 6.19 6.47	Pengembangan sarpras penangkapan & kampung/sentra nelayan.
Pengembangan ekonomi biru (PN 2) dan hilirisasi industri berbasis SDA, termasuk olahan perikanan & garam (PN 5)	Volume produksi garam (juta ton)	2.04 2.25 2.5	Pengembangan industri garam.
	Nilai PDB perikanan (ADHB) (triliun Rp)	554.68 595.06 626.04	Peningkatan pengelolaan konservasi perairan & ekosistem pesisir; dukungan logistik/transportasi laut; wisata bahari; serta iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru.
	Volume produksi olahan perikanan (juta ton)	3.62 3.71 3.83	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi-modern; pengembangan produk olahan hasil laut.
Pengelolaan sampah pesisir & laut - PN 2	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir & laut kumulatif (ton)	1005.85	Program bersih pantai/laut, edukasi, serta sarpras pengumpulan/angkut di wilayah pesisir.

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah 2026 (Bappenas, 2026)



Fokus 2026 adalah mendorong produktivitas dan nilai tambah (*blue food* & ekonomi biru), menjaga keberlanjutan stok (tangkap terkendali melalui PIT & PSDKP), memperkuat hilirisasi (olahan & garam), dan memperluas manfaat lingkungan (pengurangan sampah pesisir/laut).

1) Produksi perikanan budidaya

Target 2026: 7,15 juta ton (dari outlook 2025: 6,75; capaian 2024: 6,37). Mengapa penting: menutup “gap” protein ikan nasional, menopang harga stabil, dan mengalihkan tekanan dari stok tangkap.

Intervensi kunci yang dilakukan:

- Input & sarpras budidaya: perbenihan (*broodstock center, hatchery*), pakan, listrik/air, biosekuriti & *health management*.
- Kawasan/klaster komoditas & revitalisasi tambak: udang, nila, lele, rumput laut—rehabilitasi saluran, *lining*, aerasi, dan tata air.
- *Good aquaculture practices* & sertifikasi mutu: CBIB/CKIB, *traceability*, laboratorium uji mutu/penyakit ikan.
- Pembiayaan & kemitraan: KUR/LPDB untuk pembudidaya, *offtaker* industri pengolahan.

2) Produksi perikanan tangkap

Target 2026: 6,47 juta ton (outlook 2025: 6,19; capaian 2024: 7,39). Catatan arah kebijakan: volume ditata agar berkesinambungan (PIT & kuota per WPPNRI), sehingga target bukan memaksimalkan tonase, tetapi menjaga MSY seraya menaikkan kepatuhan & nilai.

Intervensi kunci:

- Implementasi Penangkapan Ikan Terukur & MCS: kuota berbasis *sains* per WPP, *e-logbook*, VMS/AIS, *electronic monitoring*, timbangan tera di pelabuhan.
- Penguatan PSDKP: operasi kapal/speedboat pengawas, komando & intelijen laut, penindakan IUU.
- Sarpras penangkapan & kampung/sentra nelayan: TPI modern, *cold storage*, pabrik es, dermaga; penataan rantai dingin untuk mengurangi *shrinkage*.
- Selektivitas alat tangkap & keselamatan kerja (K3).

3) Garam (bagian ekonomi biru & kedaulatan pasokan)

Target 2026: 2,50 juta ton (outlook 2025: 2,25; capaian 2024: 2,04).

Intervensi kunci:

- Produktivitas lahan garam rakyat: geomembran, *tunnel*, *green house*, *ion layer*, tata air; target produktivitas > ~85 ton/ha.
- Pembinaan kualitas & standardisasi (NaCl): laboratorium/uji mutu, *quality control* hulu.
- Kemitraan & *offtake* industri: integrasi dengan pengguna besar (kimia, farmasi, pangan), logistik gudang & *buffer stock*.

4) PDB perikanan (ADHB)

Target 2026: Rp626,04 triliun (2024: Rp554,68; 2025: Rp595,06).

Arah kebijakan: tumbuh ~6% tahunan melalui naik kelas dari komoditas mentah ke bernilai tambah.

Intervensi kunci:

- Ekonomi biru terpadu: konservasi perairan & ekosistem pesisir (KKP3K), penataan ruang laut untuk investasi yang berkelanjutan.
- Logistik/transportasi laut & konektivitas: *backbone* rantai dingin nasional, pelabuhan perikanan berstandar.
- Wisata bahari & jasa kelautan sebagai penopang PDB daerah pesisir.
- Iptek, inovasi, SDM: riset genetika/benih, pakan, teknologi budidaya modern; *upskilling* penyuluh/nelayan/pembudidaya.

5) Volume produksi olahan perikanan

Target 2026: 3,83 juta ton (2025: 3,71; 2024: 3,62).

Intervensi kunci:

- Modernisasi & perluasan kapasitas industri olahan: pengalengan, *surimi*, fillet, *ready-to-eat*; fasilitasi izin & sertifikasi (HACCP, SSOP).
- Aglomerasi & kawasan industri hasil laut dekat sentra bahan baku; efisiensi energi & air.
- Diversifikasi produk & pasar ekspor/domestik, *branding* dan *market intelligence*.
- Pengurangan kehilangan pascapanen lewat *cold chain* dan *quality handling* di hulu.

6) Penanggulangan sampah pesisir & laut (indikator kumulatif)

Target 2026: peningkatan volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir & laut (sesuai target RKP).

Intervensi kunci:

- Program bersih pantai/laut berbasis komunitas/nelayan, *fishing for litter*, kapal sapu-sampah lokal.
- Infrastruktur & skema pengumpulan-angkut di kawasan pesisir: *material recovery facility*, *drop point*, integrasi ke bank sampah.
- Edukasi & kemitraan (KKP–Pemda–KLHK–swasta/NGO) dan pendekatan ekonomi sirkular untuk plastik sekali pakai di daerah pesisir.
- Pemantauan & pelaporan berbasis lokasi (GIS) untuk transparansi capaian.

Target-target di atas secara alami mendorong kebutuhan belanja pada: (i) belanja modal (pelabuhan/TPI, *cold chain*, tambak & *hatchery*, lab mutu, kapal pengawas), (ii) operasional MCS/PSDKP, (iii) standardisasi & sertifikasi mutu, dan (iv) riset, SDM, dan kemitraan industri—sejalan dengan Prioritas Nasional PN-2 (*blue food*/ekonomi biru) dan PN-5 (hilirisasi/industri berbasis SDA).